

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(L K j I P)
TAHUN ANGGARAN 2024

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN



DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Alamat : Jl. SPG Nomor 5 Rantau 71114 Kalimantan Selatan

Nomor Telepon : (0517) 31062

Website : dpmd.profile.tapinkab.go.id

E-mail : dpmdkabtapin@gmail.com

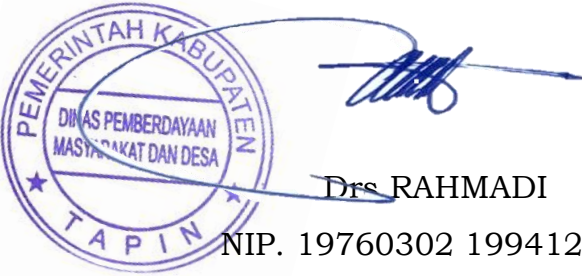
KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapin Tahun 2024 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024. LKjIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapin Tahun 2024 merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi dan penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah. Penyusunan LKjIP Tahun 2024 diwarnai agenda *refocusing* dan realokasi anggaran. Sumber Daya yang dimiliki Pemerintah Daerah difokuskan untuk menjamin ketersediaan dukungan bidang Kesehatan, bantuan sosial dan upaya peningkatan ekonomi. Meskipun demikian Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tetap mengupayakan optimalisasi capaian target kinerja yang telah diperjanjikan.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LKjIP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.

Rantau, Januari 2025

Kepala DPMD


Drs RAHMADI
NIP. 19760302 199412 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Gambaran Umum	1
1.2. Penjelasan Umum Organisasi	2
1.3. Dasar Hukum	7
1.4. Sistematika Laporan Kinerja	8
1.5. Permasalahan dan Isu Strategis	9
 BAB II PERENCANAAN KINERJA	 13
2.1. Tujuan dan Sasaran Strategis	13
2.2. Rencana Kinerja Tahun 2024	17
2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2024	17
 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	 26
3.1. Capaian Kinerja	26
3.1.1 Skala Capaian Kinerja	27
3.1.2 Membandingkan antara target dan realisasi tahun pelaporan	27
3.1.3.Membandingkan anantara Realisasi Kinerja serta capaian kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu dan beberapa tahun terakhir	37
3.1.4.Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis	39
3.1.5.Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan standart nasional (jika ada)	41
3.1.6.Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan /Penurunan Kinerja serta Alternatif solusi yang telah dilakukan	42
3.1.7.Analisis Atas Penggunaan Sumber Daya	45
3.1.8.Analisis Program / Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja	48
3.2. Realisasi Anggaran	67
 BAB IV PENUTUP	 72

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 menjelaskan bahwa laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 18 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, setiap perangkat daerah yang merupakan entitas akuntabilitas kinerja, menyusun dan menyajikan laporan kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan. Sehubungan dengan hal tersebut maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LKjIP).

Penyusunan LKJIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2024 yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran terkait pencapaian kinerja tujuan dan sasaran perangkat daerah yang telah ditetapkan dan diperjanjikan pada perjanjian kinerja perangkat daerah. Penyusunan pelaporan kinerja bertujuan untuk memberikan informasi

kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai, dan juga sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerja.

1.2 Penjelasan Umum Organisasi

Berikut adalah penjelasan umum organisasi berkaitan dengan struktur organisasi dan anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa :

1.2.1 Struktur Organisasi dan Tata Kerja

Berdasarkan Peraturan Bupati Tapin No 33 Tahun 2018 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Dan Uraian Tugas Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Tapin, maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapin mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan.

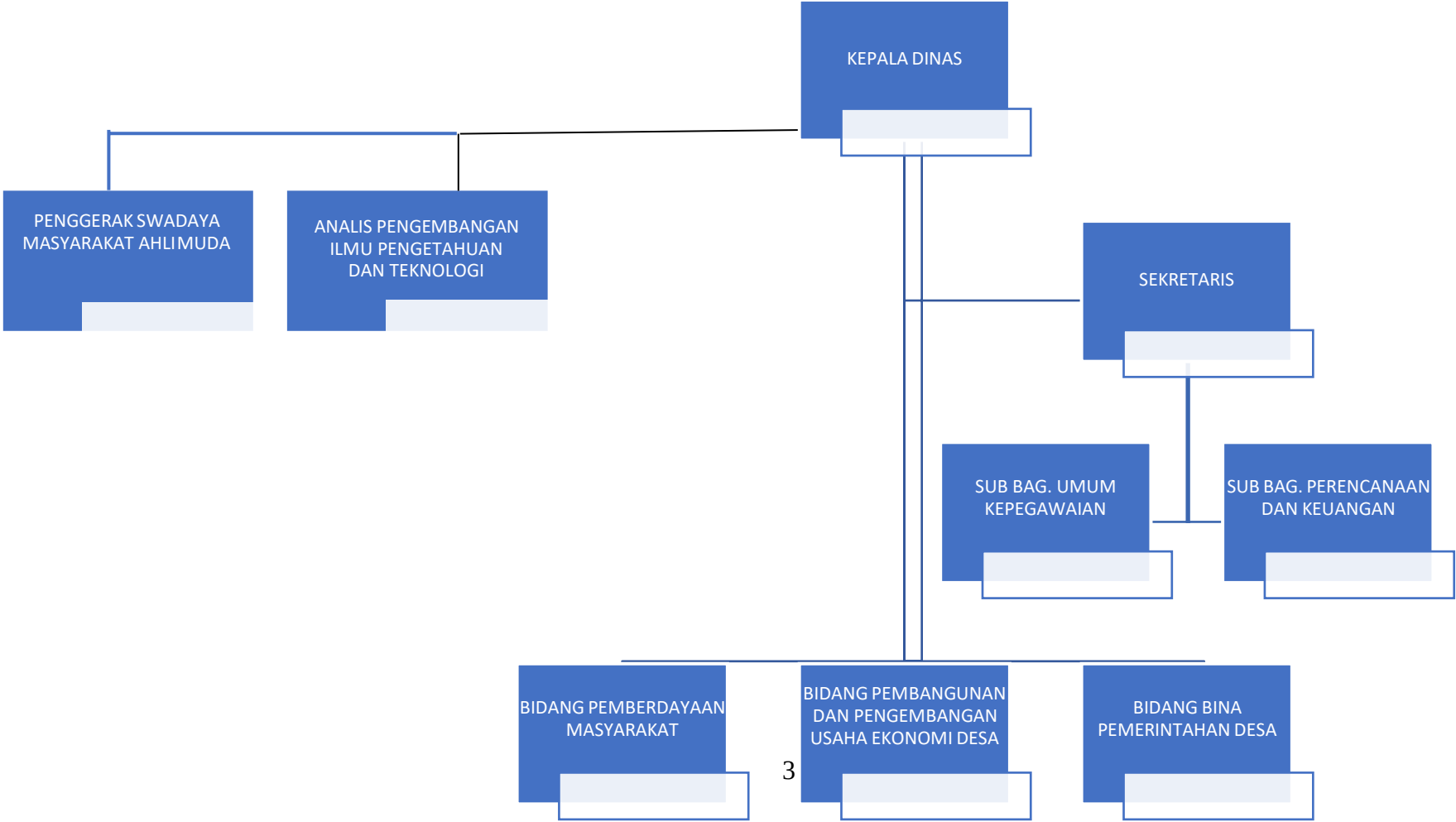
Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Tapin mempunyai fungsi :

- a. perumusan dan penetapan kebijakan teknis bidang penataan desa, kerjasama desa, administrasi pemerintahan desa, pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis bidang penataan desa, kerjasama desa, administrasi pemerintahan desa, pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat;
- c. pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan teknis bidang penataan desa, kerjasama desa, administrasi pemerintahan desa, pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat;
- d. pembinaan, pengawasan dan pengendalian UPT; dan
- e. pengelolaan kesekretariatan

Uraian tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapin adalah sebagai berikut :

- a. Mengoordinasikan, membina dan mengawasi perumusan kebijakan teknis teknis bidang penataan desa, kerjasama desa, administrasi pemerintahan desa, pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat;
- b. Mengoordinasikan, membina dan mengawasi perumusan pelaksanaan kebijakan teknis bidang penataan desa, kerjasama desa, administrasi pemerintahan desa, pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat;
- c. Mengoordinasikan, membina dan mengawasi pemantauan , evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan teknis bidang penataan desa, kerjasama desa, administrasi pemerintahan desa, pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat;
- d. Menyelenggarakan pembinaan teknis dan administrasi terhadap UPT
- e. Membina dan mengawasi pengelolaan kesekretariatan
- f. Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangan

**STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN TAPIN**



Sedangkan Susunan organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa terdiri dari :

- a. Sekretariat;
- b. Bidang Bina Pemerintahan Desa;
- c. Bidang Pemberdayaan Masyarakat;
- d. Bidang Bina Pembangunan dan Pengembangan Usaha Ekonomi Desa
- e. UPT; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

A.. SEKRETARIAT

Sekretariat mempunyai tugas mengoordinasikan, membina dan mengendalikan penyusunan rencana dan program, pengelolaan keuangan, dan menyelenggarakan urusan umum, aset dan administrasi kepegawaian.

Uraian tugas Sekretariat adalah sebagai berikut:

- a. menyusun program, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan penyusunan program dan rencana kegiatan dinas
- b. menyusun program, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan evaluasi dan pelaporan kegiatan dinas
- c. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian penyusunan anggaran dan pengelolaan keuangan
- d. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pengelolaan aset dinas
- e. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pengelolaan surat-menyurat
- f. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pengelolaan administrasi kepegawaian
- g. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan organisasi, tatalaksana dan hubungan masyarakat
- h. menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur

pengadaan perlengkapan rumah tangga yang menjadi kebutuhan dinas

- i. mengoordinasikan penyusunan Standart Operasional Prosedur (SOP) lingkup dinas
- j. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.
- k. Susunan organisasi Sekretariat, terdiri atas :
 - Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

B. BIDANG BINA PEMERINTAHAN DESA

Bidang Bina Pemerintahan Desa mempunyai tugas mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penyelenggaraan administrasi desa, pengelolaan keuangan dan aset desa dan pengembangan kapasitas aparatur serta penataan dan evaluasi perkembangan desa. Susunan organisasi Bidang Bina Pemerintahan Desa terdiri dari 2 jabatan fungsional yaitu Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda.

C. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Bidang Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pengembangan dan peningkatan Pemberdayaan Kelembagaan dan Kerjasama Desa, dan Pengembangan Kapasitas dan Partisipasi Masyarakat. Susunan Organisasi Bidang Pemberdayaan Masyarakat terdiri dari 2 jabatan fungsional yaitu Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda.

D. BIDANG PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN USAHA EKONOMI DESA

Bidang Pembangunan dan Pengembangan Usaha Ekonomi mempunyai tugas mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan Pengembangan Usaha Ekonomi Desa dan Pembangunan Kawasan Pedesaan dan Teknologi Tepat Guna.

Susunan Organisasi Bidang Pembangunan dan Pengembangan Usaha Ekonomi terdiri dari 1 jabatan fungsional yaitu Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda dan Analis Pengembangan dan Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

E. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan. Jabatan Fungsional pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa terdiri dari :

- a. 5 orang Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda
- b. 1 orang Analis Pengembangan dan Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

1.2.2 Anggaran

Pada bagian ini menjelaskan sumber dan besaran anggaran yang dimiliki oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Berikut adalah Anggaran yang dimiliki oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Tabel 1.1 Perbandingan Anggaran Tahun 2023 dan Tahun 2024

Sumber	Tahun	Jumlah
(1)	(2)	(3)
APBD	Tahun 2023	Rp 65.773.761.790
APBD	Tahun 2024	Rp 81.794.327.034

Sumber : DPA DPMD 2023 dan 2024

1.3 Dasar Hukum

Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ini disusun berdasarkan beberapa dasar hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.

2. Peraturan Pemerintah (PP) No. 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pelaporan Kinerja Pemerintah Daerah.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
7. Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 , tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten
8. Peraturan Bupati Tapin Nomor 44 Tahun 2021 tentang Standar Operasional Prosedur Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

1.4 Sistematika Laporan Kinerja

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapin Tahun 2024 adalah:

BAB I	PENDAHULUAN
	Bab ini menyajikan penjelasan umum organisasi berfokus pada aspek strategis organisasi dan permasalahan utama (<i>strategic issued</i>) yang sedang dihadapi.
BAB II	PERENCANAAN KINERJA
	Bab ini menguraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA
	3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi disesuaikan dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

3.2 Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi diuraikan sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV PENUTUP

Bab ini menguraikan simpulan secara umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

LAMPIRAN

- 1 Perjanjian Kinerja.
- Lain-lain yang dianggap perlu.

1.5. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

Pemberdayaan masyarakat atau yang biasa disebut empowerment adalah upaya untuk memberdayakan masyarakat melalui peningkatan kapasitasnya. Sedangkan pemerintahan desa merupakan tonggak pemerintahan di level paling bawah dan langsung berinteraksi dengan masyarakat dimana keberadaannya menjadi sangat penting sehingga perlu pula dilakukan peningkatan kapasitas pemerintahan desa baik lembaga maupun aparaturnya. Keberadaan Undang- Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 semakin memperkuat posisi penting pemerintah desa.

Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat semakin memperkuat pentingnya pembinaan terhadap desa dan kelurahan yang ada di Indonesia. Hal ini tercermin dalam arah kebijakan dan strategi pembangunan desa sebagai bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2024 s/d 2026 sebagai berikut :

- 1. Penanggulangan kemiskinan dan pengembangan usaha ekonomi

masyarakat Desa

- Penataan dan penguatan BUMDesa untuk mendukung ketersediaan sarana prasarana produksi khususnya benih, pupuk, pengolahan produk pertanian dan perikanan skala rumah tangga desa
 - Fasilitasi, pembinaan, pendampingan dalam pengembangan usaha, bantuan permodalan/kredit, kesempatan berusaha, pemasaran dan kewirausahaan
 - Meningkatkan kapasitas masyarakat desa dalam pemanfaatan dan pengembangan Teknologi Tepat Guna Perdesaan
2. Pembangunan sumber daya manusia, peningkatan keberdayaan, dan pembentukan modal sosial budaya masyarakat Desa
- Mengembangkan kapasitas dan pendampingan lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat secara berkelanjutan
 - Memperkuat kapasitas masyarakat desa dan masyarakat adat dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam lahan dan perairan, serta lingkungan hidup desa termasuk desa pesisir secara berkelanjutan
 - Meningkatkan kapasitas masyarakat dan kelembagaan masyarakat desa dalam meningkatkan ketahanan ekonomi, sosial, lingkungan keamanan dan politik
 - Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring, pembangunan desa
3. Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup berkelanjutan, serta penataan ruang kawasan perdesaan
- Menyiapkan dan melaksanakan kebijakan tentang akses dan hak desa untuk mengelola sumber daya alam berskala lokal termasuk pengelolaan hutan negara oleh desa berorientasi keseimbangan lingkungan hidup dan berwawasan mitigasi bencana untuk meningkatkan produksi pangan dan mewujudkan ketahanan pangan
4. Pengembangan ekonomi kawasan perdesaan untuk mendorong keterkaitan desa-kota
- Mengembangkan kerjasama antardesa, antardaerah, dan antar pemerintah swasta termasuk kerjasama pengelolaan BUMDesa, khususnya di luar Jawa-Bali

5. Pengembangan kapasitas dan pendampingan aparatur pemerintah desa dan kelembagaan pemerintahan desa secara berkelanjutan
 - Meningkatkan kapasitas pemerintah desa dan Badan Permasyarakatan Desa melalui fasilitasi, pelatihan, dan pendampingan dalam
 - Perencanaan, pelaksanaan dan monitoring pembangunan desa
 - Pengelolaan aset dan keuangan desa
 - Penyiapan peta desa dan penetapan batas desa secara digital
 - Reformasi pelayanan publik termasuk pelayanan di luar jam kantor oleh desa, kelurahan, dan kecamatan (QW)
 - Meningkatkan ketersediaan sarana prasarana pemerintahan desa
 - Mengembangkan kerjasama antar desa
 - Melaksanakan penataan desa
 - Mengembangkan pusat informasi desa/balai rakyat
6. Pengawasan implementasi UU Desa secara sistematis, konsisten, dan berkelanjutan melalui koordinasi, fasilitasi, supervisi dan pendampingan
 - Memastikan berbagai perangkat peraturan pelaksanaan UU desasejalan dengan substansi, jiwa, dan semangat UU desa, termasuk penyusunan PP sistem keuangan desa
 - Memastikan distribusi dana desa dan alokasi dana desa berjalan secara efektif, berjenjang, dan bertahap
 - Mempersiapkan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam mengoperasionalisasi pengakuan hak-hak masyarakat adat untuk dapat ditetapkan menjadi desa adat.

Dengan adanya arah kebijakan dan isu strategis ini, pemerintah pusat mengharapkan masyarakat yang berdaya dan pemerintahan desa yang kuat menjadi salah satu solusi penanggulangan kemiskinan yang saat ini juga menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Tapin.

Dalam upayanya melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat dan pemerintahan desa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapin masih menemui beberapa

kendala yang dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Pelayanan administrasi dan koordinasi pada DPMD masih belum maksimal
2. Kurang optimalnya tata kelola penyelenggaraan pemerintahan desa dan
3. Kurang maksimalnya lembaga kemasyarakatan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
4. Minimnya aparatur pemerintahan dan lembaga kemasyarakatan desa yang terampil
5. Penguatan kapasitas lembaga perekonomian masyarakat desa/kelurahan yang belum maksimal
6. Kurang optimalnya pemanfaatan dan pengembangan Teknologi Tepat Guna dan Sarana Prasarana Perdesaan

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Tujuan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah selaras dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Tapin Tahun 2024-2026 yaitu “Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat” Berikut adalah indikator kinerja dan target kinerja Tujuan dan Sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa :

1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah;
2. Meningkatnya Profesionalisme ASN Perangkat Daerah; dan
3. Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat dan Tata Kelola Desa.

Sasaran organisasi adalah bagian yang integral dalam proses perencanaan strategis organisasi, sehingga harus disusun secara konsisten. Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kaitannya dengan pencapaian kinerja yang telah ditargetkan. Sasaran merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang dirumuskan secara spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan. Adapun sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapin 2024-2026 adalah “Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat dan Tata Kelola Desa”

Tabel 2.1 Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja Perangkat Daerah Tahun Periode Rencana Strategis

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Pada Tahun				
				2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	<i>Meningkatnya Capaian LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)</i>	<i>Nilai SAKIP Perangkat Daerah</i>	75,75	77,05	78	79	80
		<i>Meningkatnya Profesionalisme ASN Perangkat Daerah</i>	<i>Indeks Profesionalisme ASN (IP-ASN) Perangkat Daerah</i>	-	50	50	60	65
2	<i>Meningkatkan Keberdayaan Masyarakat dan Tata Kelola Desa</i>	<i>Meningkatkan Keberdayaan Masyarakat dan Tata Kelola Desa</i>	<i>Persentase Desa Mandiri</i>	2,38	8,73	20,63	3,17	3,97
			<i>Persentase Desa Swasembada</i>	13,492	19,047	39,68	47,62	51,59

Sumber : Renstra DPMD Periode 2024-2026

Adapun penyajian Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Tahun 2024

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Penjelasan		
				Definisi Operasional	Formulasi/ Rumus Perhitungan	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Point	Laporan Hasil Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	<u>Komponen Penilaian :</u> 1.Perencanaan Kinerja = 30% 2.Pengukuran Kinerja = 30% 3.Pelaporan Kinerja = 15% 4.Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal = 15%	Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Inspektorat
		Indeks Profesionalisme ASN (IP-ASN) Perangkat Daerah	Point	Kompilasi Nilai dari masing-masing unsur yang ada pada aplikasi IP- ASN	Komponen Penilaian : 1. Kualifikasi = 25% 2. Kompetensi = 40% 3. Kinerja = 30% 4. Disiplin = 5%	Aplikasi Padaringan
2	Meningkatkan Keberdayaan Masyarakat dan Tata Kelola Desa	Persentase Desa Mandiri	Persen	Peningkatan Status Desa Mandiri	$\frac{\text{Jumlah Desa Mandiri}}{\text{Jumlah seluruh desa di Kabupaten Tapin}} \times 100\%$	Pemutakhiran Data IDM
		Persentase Desa	Persen	Peningkatan Status Desa	$\frac{\text{Jumlah Desa Swasembada}}{\text{Jumlah seluruh desa di Kabupaten Tapin}} \times 100\%$	Profil Desa

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Penjelasan		
				Definisi Operasional	Formulasi/ Rumus Perhitungan	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		Swasembada		Swasembada		

Sumber: Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2024

2.2 Rencana Kinerja Tahun 2024

Rencana kinerja merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra, dan akan dilaksanakan oleh perangkat daerah melalui berbagai kegiatan tahunan. Rencana Kinerja Tahun 2024 termuat di dalam dokumen Renja Perangkat Daerah Tahun 2024. Berikut Rencana Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2024:

Tabel 2.3 Rencana Kinerja Tahun 2024
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Point	78
			Indeks Profesionalisme ASN (IP-ASN) Perangkat Daerah	Point	50
2	Meningkatkan Keberdayaan Masyarakat dan Tata Kelola Desa	Meningkatkan Keberdayaan Masyarakat dan Tata Kelola Desa	Persentase Desa Mandiri	Persen	20,63
			Persentase Desa Swasembada	Persen	39,68

Sumber : Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2024

2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerjanya. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Adapun Perjanjian Kinerja oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	78
		Indeks Profesionalisme ASN (IP-ASN) Perangkat Daerah	50
2	Meningkatkan Keberdayaan Masyarakat dan Tata Kelola Desa	Persentase Desa Mandiri	20,63
		Persentase Desa Swasembada	39,68

Sumber : Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2024

Dalam rangka pencapaian kinerja yang telah ditetapkan, dilaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan Perjanjian Kinerja dan selaras dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang telah

ditetapkan. Berikut rincian program, kegiatan, dan sub kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

**Tabel 2.5 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2024**

No	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	100 %
A	Perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Tindak lanjut Perencanaan Kinerja Atas Rekomendasi dari Mitra Kerja Bappelitbang	100 %
		Persentase Rekomendasi LHE AKIP yang Ditindak Lanjuti	100 %
		Persentase Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Kinerja yang Ditindaklanjuti	100 %
A.1	<i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>	<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>	14 <i>Lap</i>
B	Adminsitration Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Surat Pertanggung Jawaban yang Sesuai dengan Standar Penatausahaan Keuangan	100 %
		Persentase Laporan Keuangan yang Disampaikan Tepat Waktu dan Sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)	100 %
B.1	<i>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>	<i>Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN</i>	308 <i>Orang/ Bulan</i>

B.2	<i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>	<i>Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>	1	Laporan
B.3	<i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD</i>	<i>Jumlah laporan keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan laporan hasil koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD</i>	2	Laporan
C	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapatkan pelayanan administrasi Kepegawaian dengan baik	100	%
C.1	<i>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>	<i>Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan</i>	38	Paket
C.2	<i>Penyediaan Bahan Logistik Kantor</i>	<i>Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan</i>	11	paket
C.3	<i>Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan</i>	<i>Jumlah paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan</i>	6	Paket
C.4	<i>Penyediaan Bahan/ Material</i>	<i>Jumlah paket Bahan/ Material yang disediakan</i>	4	Paket
C.5	<i>Fasilitasi Kunjungan Tamu</i>	<i>Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu</i>	2	Laporan
C.6	<i>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	<i>Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	744	Laporan
D	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pegadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0	%
D.1	<i>Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>	<i>Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan</i>	2	Unit
D.2	<i>Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</i>	<i>Jumlah unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan</i>	-	Unit

E	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Kelulusan ASN Perangkat Daerah yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas ASN	100	%
E.1	<i>Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	1	Laporan
E.2	<i>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik yang disediakan</i>	5	Laporan
E.3	<i>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</i>	<i>Jumlah Laporan penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan</i>	8	Laporan
F	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah (BMD) dalam Kondisi Baik	100	%
F.1	<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</i>	<i>Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya</i>	7	Unit
F.2	<i>Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya</i>	<i>Jumlah peralatan dan Mesin lainnya yang dipelihara</i>	13	Unit
F.3	<i>Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</i>	<i>Jumlah Gedung Kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi</i>	-	-
2	PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase desa yang tertata sesuai dengan ketentuan	60	%
	Penyelenggaraan Penataan Desa	Persentase Wilayah Desa yang Sesuai dengan Ketentuan yang Berlaku	90	%
	<i>Fasilitasi tata wilayah desa</i>	<i>Jumlah desa yang terfasilitasi penataan wilayahnya</i>	126	Desa
	<i>Fasilitasi Penataan Kewenangannya</i>	<i>Jumlah desa yang terfasilitasi penataan kewenangannya</i>	126	Desa
3	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Persentase desa yang tertata sesuai dengan ketentuan	60	%

	Fasilitasi Kerjasama Antar Desa	Persentase Desa yang Melakukan Kerja Sama Sesuai Ketentuan	90 %
	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak ketiga dalam Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen kerja sama antar desa dengan pihak ketiga dalam kabupaten/kota	4 Dokumen
	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen kerja sama antar desa dalam kabupaten/kota	1 Dokumen
	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah dokumen hasil fasilitasi pembangunan kawasan perdesaan	7 Dokumen
4	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang tertata sesuai dengan ketentuan	60 %
		Persentase Status Bumdes	5 %
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase aparatur desa yang sesuai ketentuan yang berlaku	90 %
		Persentase desa yang melakukan pengelolaan keuangan desa sesuai ketentuan	90 %
		Persentase desa yang melakukan pengelolaan aset desa sesuai ketentuan	85 %
		Persentase Bumdes dan Bumdesma yang menghasilkan PADes	54 %
	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	1 Dokumen
	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	1 Dokumen
	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	1 Dokumen
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah dokumen hasil fasilitasi pengelolaan keuangan desa	1 Dokumen
	Pembinaan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	126 Orang

	Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	1 Laporan
	Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Jumlah dokumen hasil evaluasi dan pengawasan peraturan desa	1 Dokumen
	Pembinaan dan pemberdayaan BUMDESA dan lembaga kerjasama antar desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan pemberdayaan BUMDESA dan lembaga kerjasama antar desa	1 Dokumen
	Penyelenggaraan pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian kepala desa	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	1 Laporan
	fasiilitas pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	1 Laporan
	Fasilitas Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun	1 Dokumen
	Fasilitasi Manajemen Pemerintah Desa	Jumlah dokumen hasil fasilitasi manajemen pemerintahan desa	1 Dokumen
	Fasilitasi pengelolaan aset desa	Jumlah dokumen hasil fasilitasi pengelolaan aset desa	1 Dokumen
	Pembinaan peningkatan kapasitas anggota BPD	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	126 Orang
	Fasilitas Penetapan dan Penegasan batas Desa	Jumlah desa yang difasilitasi dalam penetapan dan penegasan batas desa	50 Desa
	Pembinaan laporan Kepala Desa	Jumlah laporan hasil fasilitasi pembinaan laporan kepala desa	1 Laporan
	Fasilitasi evaluasi perkembangan desa serta lomba desa dan kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	1 Dokumen
5	PROGRAM PEMBERDAYAAN	Persentase lembaga desa yang berprestasi	10,3 %

	LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Perkembangan Status BUMDes Maju	5 %
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang	Persentase kelembagaan antar desa yang berkerjasama	100 %
	Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa yang Aktif	81 %
	serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat	Persentase Bumdes dan Bumdesma yang Aktif	66 %
	Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase desa yang memanfaatkan teknologi tepat guna	5 %
	Fasilitasi penataan, pemberdayaan dan pendayagunaan kelembagaan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan (RT,RW,PKK,Posyandu,LP M,dan Karang Taruna), Lembaga adat desa/kelurahan dan masyarakat hukum adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	1 Dokumen
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	5 Lembaga
	Peningkatan kapasitas kelembagaan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan (RT,RW,PKK,Posyandu,LP M,dan Karang Taruna), lembaga adat	Persentase lembaga masyarakat yang dibina	100 %
		Persentase hasil Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Lembaga Kemasyarakatan Desa yang ditindaklanjuti	50 %

	desa/kelurahan dan masyarakat hukum adat	Persentase Badan kerjasama antar desa yang mampu melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai ketentuan	70 %
		Persentase MoU yang dihasilkan	42 %
	Fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan pemerintah desa dalam meningkatkan pendapatan asli desa	Jumlah dokumen hasil fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan pemerintah desa dalam meningkatkan pendapatan asli desa	1 Dokumen
		Persentase Bumdes dan Bumdesma yang dibina	100 %
		Persentase bumdes dan bumdesma yang tertib administrasi dan berbadan hukum	35 %
		Persentase pengelola bumdes dan bumdesma yang memahami tugas dan fungsi	100 %
	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah laporan hasil fasilitasi pemerintahan Desa dalam pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1 Laporan
		Persentase posyantek dan posyantekdes yang aktif	50 %
		Persentase posyantek dan posyantekdes yang tertib administrasi	100 %
	Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong	Jumlah Kecamatan yang di fasilitasi	0 Laporan

Sumber : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Nama Perangkat Daerah Tahun 2024

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima laporan akuntabilitas/pemberi amanah. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2024 – 2026 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran instansi pemerintah. Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

3.1.1 Skala Capaian Kinerja

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja, sebagai berikut:

Tabel 3.1 Pengkategorian Capaian Kinerja

No	Kategori/Interpretasi	Rata-Rata % Capaian
1	Sangat Tinggi	$91 \leq 100$
2	Tinggi	$76 \leq 90$
3	Sedang	$66 \leq 75$
4	Rendah	$51 \leq 65$
5	Sangat Rendah	≤ 50

Sumber: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

3.1.2 Membandingkan antara target dan realisasi tahun pelaporan

Hasil pengukuran atas Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2024 menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.2 Capaian Kinerja Perjanjian Kinerja Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	78	77,05	98,78	-	LHE Inspektorat

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2	Meningkatnya Profesionalisme ASN Perangkat Daerah	Indeks profesionalisme ASN (IP- ASN) Perangkat Daerah	50	65,91	131,82	-	IP – ASN (Padaringan)
3	Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat dan Tata Kelola Desa	Persentase Desa Mandiri	20,63%	59,52%	288,51	-	Pemutakhiran Data IDM
		Persentase Desa Swasembada	39,68%	32,53%	81,98 %	-	Profil Desa

Sumber : Data Capaian IKU DPMD Tahun 2024

Berdasarkan tabel diatas maka dapat dijabarkan deskripsi pencapaian program dan kegiatan DPMD Kabupaten Tapin Tahun 2024 sebagai berikut:

Sasaran 1 : Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Pencapaian sasaran 1 didukung oleh Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan total anggaran sebesar **Rp. 9.655.000,-** dengan Realisasi kinerja keuangan Tahun 2024 adalah sebesar **Rp. 9.119.100,-** atau **94,45%** dari anggaran dengan capaian kinerja sebesar **98,78%** dari target yang telah ditetapkan Tahun 2024.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	78	77,05	98,78%

Sumber : LHE Sakip Inspektorat Tahun 2024

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa capaian atas target sasaran “Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah” adalah sebesar **98,78%** yang berarti masuk dalam kategori “**berhasil**”.



**DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA**
KABUPATEN TAPIN
dpmd.profil.tapin.kab.go.id

LAPORAN HASIL EVALUASI ATAS IMPLEMENTASI
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DAERAH (SAKIP) TAHUN 2023

KOMPONEN YANG DI NILAI	BOBOT	NILAI 2023
a. <u>Perencanaan</u> Kinerja	30	26,10
b. <u>Pengukuran</u> Kinerja	30	23,70
c. <u>Pelaporan</u> Kinerja	15	11,25
d. <u>Evaluasi Akuntabilitas</u> Kinerja Internal	25	16,00
Nilai Akuntabilitas Kinerja	100	77,05
Tingkat Akuntabilitas Kinerja		BB



Sumber : LHE Sakip Inspektorat Tahun 2024

Sasaran 2 : Meningkatkan ASN Perangkat Daerah

Pencapaian sasaran 2 didukung oleh *Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah* dengan total anggaran sebesar **Rp. 2.674.835.012,-** dengan Realisasi kinerja keuangan Tahun 2024 adalah sebesar **Rp.**

2.605.758.274,- atau **97,42%** dari anggaran dengan capaian kinerja sebesar **131,82%** dari target yang telah ditetapkan Tahun 2024.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Profesionalisme ASN Perangkat Daerah	Indeks profesionalisme ASN (IP- ASN) Perangkat Daerah	50	65,91	131,82%

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa capaian atas target sasaran “Meningkatnya Profesionalisme ASN Perangkat Daerah” adalah sebesar **131,82%** yang berarti masuk dalam kategori “ **sangat berhasil**”. Namun secara realisasi masih berada pada kategori rendah karena masih mempunyai nilai di bawah 70. Untuk kedepannya DPMD berusaha lebih meningkatkan lagi nilai IP-ASN ini agar bisa mencapai hasil yang maksimal. Hal ini tentunya sangat ditentukan oleh sumber daya manusia ASN yang ada di DPMD itu sendiri untuk bisa meningkatkan kesadaran masing-masing ASN nya untuk lebih meningkatkan nilai IP-ASN nya.

NO	NIP	NAMA	UNOR	KUALIFIKASI	KOMPETENSI	KINERJA	DISIPLIN	TOTAL	TAHUN	UPDATED
1	196609191989031014	ABDUL MALIK	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	15	15	25	5	60	2024	30-Jun-24
2	197603021994121001	RAHMADI	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	20	40	25	5	90	2024	30-Jun-24
3	199603262020122009	NURUL FAJRIAH	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	22	0	25	5	52	2024	30-Jun-24
4	198808092020121003	INDRA NOOR FAJRI KURNIAW	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	22	31	25	5	83	2024	30-Jun-24
5	198911132020122003	SRI NOVARIYANTI	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	21	17,5	25	5	68,5	2024	30-Jun-24
6	198602152020121004	LUTFI AWWALI	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	21	17,5	25	5	68,5	2024	30-Jun-24
7	199408132020121005	MUHAMMAD AGIL ANWARI	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	22	40	25	5	92	2024	30-Jun-24
8	198206212010011017	M.E. IWAN SATRIYANSYAH	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	20	12	25	5	62	2024	30-Jun-24
9	197010102007011048	H A M B E R A N	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	20	0	25	5	50	2024	30-Jun-24
10	197001271989032003	NOR IZATIL HASANAH	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	20	0	25	5	50	2024	30-Jun-24
11	197603142007011024	M U L Y A D I	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	20	17,5	25	5	67,5	2024	30-Jun-24
12	197309201996031001	DIDIN MUHTADIN	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	20	15	25	5	65	2024	30-Jun-24
13	197207171999031007	TOMY YULIAN ARRIZKY	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	23	0	25	5	53	2024	30-Jun-24
14	197107031993032010	SRI YULIANTHI	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	21	25	25	5	76	2024	30-Jun-24
15	196903191993031004	SUFIAN SURI	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	23	25	25	5	78	2024	30-Jun-24
16	197307102007011015	RUDI HARTONO	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	10	0	25	5	40	2024	30-Jun-24
17	197810092009042002	DINA HANDAYANI	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	20	10	25	5	60	2024	30-Jun-24
18	198410312010011012	FATHUR RAHMAN	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	20	25	25	5	75	2024	30-Jun-24
19	197912052010012010	MARISA ANTI RAINI	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	20	0	25	5	50	2024	30-Jun-24
20	197912042014061001	SERLIA NOOR	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	20	25	25	5	75	2024	30-Jun-24
21	197904102014062007	ENNY HIDYA	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	20	15	25	5	65	2024	30-Jun-24
22	199901152022021001	RAMADHANI	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	22	17,5	25	5	69,5	2024	30-Jun-24
								65,91		

Sumber : IP - ASN DPMD Tahun 2024

Sasaran 3 : Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat dan Tata Kelola Desa

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat dan Tata Kelola Desa	Persentase Desa Mandiri	20,63%	59,52%	288,51%
		Persentase Desa Swasembada	39,68%	32,53%	81,98%

1. *Persentase Desa Mandiri*

Desa mandiri adalah desa maju yang memiliki kemampuan

melaksanakan pembangunan desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa dengan ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan. Pemberdayaan masyarakat desa merupakan suatu upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran serta memanfaatkan sumber daya melalui kebijakan program, kegiatan, dan pendampingan dan prioritas kebutuhan masyarakat desa. Kemandirian desa diukur dari tiga aspek yaitu, ketahanan ekonomi, ketahanan sosial dan ketahanan ekologi/lingkungan. Pengembangan desa menuju desa mandiri memerlukan kerjasama yang melibatkan beragam sektoral dan stakeholder pada suatu wilayah. Kerjasama ini tidak saja kerjasama dalam bentuk horisontal (antar elemen masyarakat desa), tetapi juga kerjasama vertikal.

Indikator Kinerja Persentase Desa Mandiri ini didukung oleh *Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat*. Kegiatan *Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat* dengan total anggaran sebesar **Rp. 1.150.808.182,-** dengan Realisasi kinerja keuangan Tahun 2024 adalah sebesar **Rp. 1.084.289.520,-** atau **94,22%** dari anggaran dengan capaian kinerja sebesar **288,51%** atau sebanyak 75 Desa berstatus Mandiri dari target 26 Desa Mandiri yang telah ditetapkan Tahun 2024.

DATA INDEKS DESA MEMBANGUN (IDM)

KABUPATEN TAPIN

TAHUN 2024

KECAMATAN	No	Nama Desa	Daftar Nilai & Status				
			IKS	IKE	IKL	IDM	Status
BINUANG	1	TUNGKAP	0,8171	0,7667	0,8667	0,8168	Mandiri
	2	A. YANI PURA	0,8571	0,7333	0,8667	0,8190	Mandiri
	3	PULAU PINANG	0,9200	0,7333	0,9333	0,8622	Mandiri
	4	PUALAM SARI	0,9429	0,7500	0,8667	0,8532	Mandiri
	5	GUNUNG BATU	0,8343	0,6167	0,8667	0,7725	Maju
	6	PULAU PINANG UTARA	0,9314	0,7833	0,6667	0,7938	Maju
	7	PADANG SARI	0,8514	0,7333	0,8667	0,8171	Mandiri
	8	MEKAR SARI	0,8571	0,7333	0,8667	0,8190	Mandiri
TAPIN SELATAN	9	TATAKAN	0,8229	0,7667	0,8667	0,8187	Mandiri
	10	SUATO TATAKAN	0,8457	0,6667	0,8667	0,7930	Maju
	11	SAWANG	0,8514	0,7333	0,8667	0,8171	Mandiri
	12	LAWAHAN	0,8229	0,7667	0,8667	0,8187	Mandiri
	13	TIMBAAN	0,8171	0,7667	0,8667	0,8168	Mandiri
	14	RUMINTIN	0,8171	0,7667	0,8667	0,8168	Mandiri
	15	CEMPAKA	0,8000	0,7833	0,8667	0,8167	Mandiri
	16	HARAPAN MASA	0,8171	0,7667	0,8667	0,8168	Mandiri
	17	TANDUI	0,8171	0,7500	0,8667	0,8113	Maju
	18	HATIWIN	0,8171	0,7667	0,8667	0,8168	Mandiri
TAPIN TENGAH	19	PANDULANGAN	0,8000	0,7167	0,9333	0,8167	Mandiri
	20	LABUNG	0,8171	0,7000	0,9333	0,8168	Mandiri
	21	MANDURIAN	0,8400	0,7500	0,8667	0,8189	Mandiri
	22	SERAWI	0,8171	0,7833	0,8667	0,8224	Mandiri
	23	PEMATANG KARANGAN HULU	0,8457	0,7667	0,8667	0,8263	Mandiri
	24	PEMATANG KARANGAN	0,8343	0,6833	0,9333	0,8170	Mandiri
	25	PANDAHAN	0,8514	0,7333	0,8667	0,8171	Mandiri
	26	PEMATANG KARANGAN HILIR	0,8400	0,7500	0,8667	0,8189	Mandiri
	27	HIYUNG	0,7657	0,7667	0,9333	0,8219	Mandiri
	28	ANDHIKA	0,8343	0,6833	0,9333	0,8170	Mandiri
	29	SUKARAMAI	0,7714	0,6667	0,8667	0,7683	Maju
	30	TIRIK	0,8171	0,7667	0,8667	0,8168	Mandiri
	31	KEPAYANG	0,8057	0,7333	0,6667	0,7352	Maju
	32	BATANG LANTIK	0,8343	0,7667	0,6667	0,7559	Maju
	33	MANDURIAN HILIR	0,8343	0,7500	0,8667	0,8170	Mandiri
	34	SUNGAI BAHALANG	0,8229	0,7667	0,6667	0,7521	Maju
	35	PAPAGAN MAKMUR	0,8171	0,6833	0,8667	0,7890	Maju
TAPIN UTARA	36	KERAMAT	0,7714	0,7500	0,8667	0,7960	Maju
	37	ANTASARI	0,8286	0,7667	0,8667	0,8206	Mandiri
	38	JINGAH BABARIS	0,8514	0,7833	0,8000	0,8116	Maju
	39	BANUA HANYAR	0,8114	0,7667	0,7333	0,7705	Maju
	40	BANUA HALAT KIRI	0,8057	0,7333	0,9333	0,8241	Mandiri
	41	BANUA HALAT KANAN	0,8000	0,7167	0,8000	0,7722	Maju
	42	PERINTIS RAYA	0,8629	0,7667	0,8667	0,8321	Mandiri
	43	KAKARAN	0,8286	0,7667	0,8000	0,7984	Maju
	44	ANTASARI HILIR	0,8457	0,7500	0,8667	0,8208	Mandiri
	45	LUMBU RAYA	0,8400	0,7500	0,8667	0,8189	Mandiri
	46	BANUA HANYAR HULU	0,8286	0,7000	0,8000	0,7762	Maju
	47	BADAUN	0,8171	0,7167	0,7333	0,7557	Maju

CANDI LARAS SELATAN	48	MARGASARI HULU	0,8171	0,7667	0,8667	0,8168	Mandiri
	49	CANDI LARAS	0,8171	0,6000	0,8667	0,7613	Maju
	50	BARINGIN A	0,8914	0,8500	0,8667	0,8694	Mandiri
	51	MARAMPIAU	0,8171	0,7667	0,8667	0,8168	Mandiri
	52	PABAUNGAN HILIR	0,8171	0,7833	0,8667	0,8224	Mandiri
	53	PABAUNGAN HULU	0,7829	0,8000	0,8667	0,8165	Mandiri
	54	SUNGAI RUTAS	0,8286	0,8167	0,6667	0,7706	Maju
	55	BARINGIN B	0,8457	0,6833	0,8667	0,7986	Maju
	56	MARAMPIAU HILIR	0,8229	0,7000	0,8667	0,7965	Maju
	57	SUNGAI RUTAS HULU	0,7943	0,8333	0,6667	0,7648	Maju
	58	BAULIN	0,7943	0,7333	0,6667	0,7314	Maju
CANDI LARAS UTARA	59	PABAUNGAN PANTAI	0,7771	0,6833	0,6667	0,7090	Maju
	60	KELADAN	0,7486	0,7000	0,8667	0,7717	Maju
	61	SUNGAI SALAI	0,7314	0,5500	0,8667	0,7160	Maju
	62	PARIOK	0,8000	0,7833	0,8667	0,8167	Mandiri
	63	MARGASARI HILIR	0,8800	0,7167	0,8667	0,8211	Mandiri
	64	BATALAS	0,8000	0,6000	0,8667	0,7556	Maju
	65	RAWANA	0,6457	0,6167	0,8667	0,7097	Maju
	66	BUAS-BUAS	0,7486	0,6667	0,7333	0,7162	Maju
	67	TELUK HAUR	0,6971	0,8000	0,6667	0,7213	Maju
	68	SUNGAI PUTING	0,8457	0,6167	0,8667	0,7763	Maju
	69	SAWAJA	0,7257	0,5333	0,8667	0,7086	Maju
	70	SUNGAI SALAI HILIR	0,7486	0,5500	0,8667	0,7217	Maju
BAKARANGAN	71	BUAS-BUAS HILIR	0,7086	0,6667	0,8000	0,7251	Maju
	72	RAWANA HULU	0,6971	0,5667	0,8667	0,7102	Maju
	73	PARIGI KACIL	0,8000	0,7833	0,8667	0,8167	Mandiri
	74	BAKARANGAN	0,8457	0,7500	0,8667	0,8208	Mandiri
	75	PARIGI	0,8171	0,7667	0,8667	0,8168	Mandiri
	76	PAUL	0,8057	0,6833	0,9333	0,8075	Maju
	77	GADUNG	0,7657	0,7167	0,9333	0,8052	Maju
	78	BUNDUNG	0,8057	0,7500	0,6667	0,7408	Maju
	79	TANGKAWANG	0,7829	0,7333	0,9333	0,8165	Mandiri
	80	WARINGIN	0,8000	0,7167	0,9333	0,8167	Mandiri
	81	GADUNG KERAMAT	0,8057	0,7167	0,9333	0,8186	Mandiri
	82	MASTA	0,7143	0,6667	0,8667	0,7492	Maju
PIANI	83	KETAPANG	0,8057	0,7333	0,6667	0,7352	Maju
	84	TANGKAWANG BARU	0,8229	0,7667	0,8667	0,8187	Mandiri
	85	PIPITAK JAYA	0,8057	0,7667	0,6667	0,7463	Maju
	86	MIAWA	0,9429	0,8333	0,9333	0,9032	Mandiri
	87	BATU AMPAR	0,8057	0,6667	0,6667	0,7130	Maju
	88	HARAKIT	0,8229	0,5000	0,8000	0,7076	Maju
	89	BATUNG	0,7829	0,7500	0,6667	0,7332	Maju
	90	BALAWAIAN	0,8514	0,7333	0,8667	0,8171	Mandiri
BUNGUR	91	BARAMBAN	0,8514	0,7333	0,8667	0,8171	Mandiri
	92	BUNIIN JAYA	0,8743	0,7000	0,6667	0,7470	Maju
	93	KALUMPANG	0,8057	0,7833	0,8667	0,8186	Mandiri
	94	BANUA PADANG	0,8343	0,7667	0,8667	0,8225	Mandiri
	95	BUNGUR	0,8857	0,6833	0,9333	0,8341	Mandiri
	96	BANUA PADANG HILIR	0,8114	0,7833	0,8667	0,8205	Mandiri
	97	SHABAH	0,8229	0,7667	0,8667	0,8187	Mandiri
	98	HANGUI	0,7886	0,6667	0,9333	0,7962	Maju
	99	RANTAU BUJUR	0,8343	0,6833	0,9333	0,8170	Mandiri
	100	PURUT	0,8286	0,7667	0,8667	0,8206	Mandiri
	101	BUNGUR BARU	0,8457	0,7500	0,8667	0,8208	Mandiri
	102	TIMBUNG	0,7714	0,7167	0,8667	0,7849	Maju
	103	PARING GULING	0,7886	0,8000	0,7333	0,7740	Maju
	104	LINUH	0,8171	0,7667	0,8667	0,8168	Mandiri

LOKPAIKAT	105	BINDERANG	0,9257	0,8333	0,8667	0,8752	Mandiri
	106	PARANDAKAN	0,8229	0,7667	0,8667	0,8187	Mandiri
	107	LOKPAIKAT	0,8686	0,7833	0,8667	0,8395	Mandiri
	108	BATARATAT	0,8857	0,7833	0,8667	0,8452	Mandiri
	109	BITAHAN BARU	0,8229	0,7667	0,8667	0,8187	Mandiri
	110	PUNCAK HARAPAN	0,8171	0,7667	0,8667	0,8168	Mandiri
	111	BUDI MULYA	0,8343	0,7500	0,8667	0,8170	Mandiri
	112	AYUNAN PAPAN	0,8514	0,7500	0,8667	0,8227	Mandiri
SALAM BABARIS	113	SALAM BABARIS	0,9371	0,8333	0,8000	0,8568	Mandiri
	114	SUATO LAMA	0,8743	0,7833	0,8000	0,8192	Mandiri
	115	KAMBANG HABANG LAMA	0,8229	0,7667	0,8667	0,8187	Mandiri
	116	PANTAI CABE	0,8800	0,8167	0,8667	0,8544	Mandiri
	117	SUATO BARU	0,8400	0,7500	0,8667	0,8189	Mandiri
	118	KAMBANG HABANG BARU	0,8286	0,7500	0,6667	0,7484	Maju
HATUNGUN	119	TARUNGUN	0,8114	0,7833	0,8667	0,8205	Mandiri
	120	MATANG BATAS	0,8000	0,7833	0,8667	0,8167	Mandiri
	121	HATUNGUN	0,8514	0,7667	0,8667	0,8283	Mandiri
	122	BURAKAI	0,8171	0,7000	0,6667	0,7279	Maju
	123	BATU HAPU	0,8457	0,7500	0,8667	0,8208	Mandiri
	124	KAMBANG KUNING	0,8514	0,7333	0,8667	0,8171	Mandiri
	125	ASAM RANDAH	0,8171	0,7000	0,6667	0,7279	Maju
	126	BAGAK	0,8114	0,7333	0,6667	0,7371	Maju
Total			0,8208	0,7337	0,8365	0,7970	Maju

Sumber : Pemutakhiran Data IDM

1	Mandiri	75
2	Maju	51
3	Berkembang	0
4	Tertinggal	0
5	Sangat Tertinggal	0

2. **Persentase Desa Swasembada**

Desa swasembada adalah desa yang masyarakatnya mampu memanfaatkan dan mengembangkan potensi desa secara optimal. Desa swasembada juga disebut desa maju atau berkembang. Desa Swasembada adalah konsep pembangunan desa

yang bertujuan untuk mencapai kemandirian pangan di tingkat desa. Dalam desa swasembada, masyarakat desa berupaya untuk memproduksi dan memenuhi kebutuhan pangan mereka sendiri secara mandiri, dengan mengoptimalkan potensi pertanian, perikanan, peternakan, dan sektor agribisnis lainnya. Desa swasembada berfokus pada peningkatan produksi pertanian, pengembangan teknologi pertanian yang inovatif, dan peningkatan akses pasar bagi produk pertanian desa. Dengan menjadi desa swasembada, desa dapat mengurangi ketergantungan terhadap impor pangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa

Desa swasembada juga merupakan jenis desa di mana masyarakatnya dapat memenuhi sebagian besar, jika tidak semua, setidaknya kebutuhan mereka sendiri. Masyarakat desa swasembada sudah mampu memanfaatkan dan mengembangkan potensi desa secara optimal. Mereka tidak bergantung secara signifikan pada pasokan dari luar desa untuk makanan, air, energi, dan barang-barang penting lainnya.

Indikator Kinerja Persentase didukung oleh *Program Administrasi Pemerintahan Desa dan Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Profil Desa* dengan total anggaran sebesar **Rp. 23.307.200,-** dengan Realisasi kinerja keuangan Tahun 2024 adalah sebesar **Rp. 13.323.800,-** atau **57,17%** dari anggaran dengan capaian kinerja sebesar **81,98%** atau sebanyak 41 Desa berstatus Swasembada dari target 50 Desa Swasembada yang telah ditetapkan Tahun 2024

DESA BERSTATUS SWASEMBADA											
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN TAPIN											
TAHUN 2024											
NO	Tahun	Kecamatan	Desa	Ekonomi Masyarakat	Pendidikan Masyarakat	Kesehatan Masyarakat	Keamanan dan Ketertiban	Kedaulatan Politik Masyarakat	Peran serta Masyarakat dalam Pembangunan	Indeks	Klasifikasi
1	2024	Binuang	P UALAM SARI	0,59	0,64	0,91	100	0,71	100	0,81	SWASEMBADA
2	2024	Tapin Selatan	LAWAHAN	0,61	0,71	0,81	100	0,87	100	0,83	SWASEMBADA
3	2024	Tapin Selatan	TIMBAAN	0,61	0,70	0,79	100	0,82	0,89	0,80	SWASEMBADA
4	2024	Salam Babaris	KAMBANG HABANG LAMA	0,63	0,75	0,87	100	0,83	100	0,85	SWASEMBADA
5	2024	Salam Babaris	SUATO LAMA	0,63	0,62	0,81	100	0,76	100	0,80	SWASEMBADA
6	2024	Tapin Tengah	SUNGAIBAHALANG	0,78	0,67	0,72	0,96	0,84	0,89	0,81	SWASEMBADA
7	2024	Tapin Tengah	SERAWI	0,64	0,74	0,84	100	0,76	0,89	0,81	SWASEMBADA
8	2024	Tapin Tengah	KEP AYANG	0,54	0,70	0,79	100	0,91	0,89	0,81	SWASEMBADA
9	2024	Bungur	P ARING GULING	0,78	0,73	0,77	100	0,79	0,78	0,81	SWASEMBADA
10	2024	Bungur	RANTAU BUJUR	0,59	0,70	0,91	100	0,75	0,89	0,81	SWASEMBADA
11	2024	Bungur	HANGUI	0,57	0,72	0,93	100	0,83	0,82	0,81	SWASEMBADA
12	2024	Bungur	P URUT	0,54	0,62	0,91	100	0,86	0,89	0,80	SWASEMBADA
13	2024	Bungur	BUNGUR	0,66	0,61	0,92	100	0,79	100	0,83	SWASEMBADA
14	2024	P iani	BARAMBAN	0,63	0,69	0,92	100	0,79	100	0,84	SWASEMBADA
15	2024	P iani	MIAWA	0,61	0,67	0,86	100	0,79	100	0,82	SWASEMBADA
16	2024	P iani	BUNIN JAYA	0,69	0,70	0,80	100	0,82	100	0,84	SWASEMBADA
17	2024	P iani	BATU AMPAR	0,62	0,74	0,77	100	0,76	100	0,82	SWASEMBADA
18	2024	P iani	P IP ITAK JAYA	0,49	0,70	0,87	100	0,85	100	0,82	SWASEMBADA
19	2024	P iani	HARAKIT	0,61	0,78	0,69	100	0,82	100	0,82	SWASEMBADA
20	2024	P iani	BATUNG	0,62	0,64	0,85	100	0,80	100	0,82	SWASEMBADA
21	2024	P iani	BALAWAIAN	0,58	0,64	0,69	100	0,97	100	0,81	SWASEMBADA
22	2024	Lokpaikat	AYUNAN PAPAN	0,53	0,64	0,93	100	0,86	0,89	0,81	SWASEMBADA
23	2024	Lokpaikat	BITAHAN BARU	0,63	0,70	0,86	100	0,85	0,89	0,82	SWASEMBADA
24	2024	Lokpaikat	BINDERANG	0,60	0,74	0,90	100	0,81	0,89	0,82	SWASEMBADA
25	2024	Lokpaikat	BUDIMULYA	0,59	0,76	0,83	100	0,74	0,89	0,80	SWASEMBADA
26	2024	Tapin Utara	JINGAH BABARIS	0,74	0,53	100	100	0,91	0,67	0,81	SWASEMBADA
27	2024	Tapin Utara	BADAUN	0,74	0,52	0,83	100	0,73	100	0,80	SWASEMBADA
28	2024	Tapin Utara	BANUA HANYAR	0,66	0,80	0,96	100	0,85	0,89	0,86	SWASEMBADA
29	2024	Bakarangan	P ARIGI	0,59	0,78	0,92	100	0,76	100	0,84	SWASEMBADA
30	2024	Bakarangan	BAKARANGAN	0,44	0,69	0,86	0,96	0,90	100	0,81	SWASEMBADA
31	2024	Bakarangan	PAUL	0,56	0,82	0,88	100	0,87	100	0,85	SWASEMBADA
32	2024	Bakarangan	WARINGIN	0,48	0,68	0,82	100	0,87	100	0,81	SWASEMBADA
33	2024	Bakarangan	TANGKAWANG BARU	0,54	0,71	0,78	100	0,82	100	0,81	SWASEMBADA
34	2024	Bakarangan	GADUNG KERAMAT	0,45	0,78	0,74	100	0,94	100	0,82	SWASEMBADA
35	2024	Bakarangan	KETAPANG	0,56	0,83	0,91	100	0,81	100	0,85	SWASEMBADA
36	2024	Bakarangan	BUNDUNG	0,48	0,72	0,86	100	0,85	100	0,82	SWASEMBADA
37	2024	Bakarangan	GADUNG	0,46	0,67	0,88	100	0,92	100	0,82	SWASEMBADA
38	2024	Bakarangan	MASTA	100	0,73	0,83	100	0,81	100	0,89	SWASEMBADA
39	2024	Candi Laras Selatan	PABAUNGAN HILIR	0,63	0,68	0,82	100	0,71	100	0,81	SWASEMBADA
40	2024	Candi Laras Selatan	BARINGIN A.	0,63	0,69	0,89	100	0,83	0,78	0,80	SWASEMBADA
41	2024	Candi Laras Selatan	CANDILARAS	0,53	0,71	0,91	100	0,92	0,78	0,81	SWASEMBADA

Sumber : Profil Desa Tahun 2024

3.1.3 Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Perbandingan capaian kinerja Tahun 2024 dengan capaian kinerja

tahun 2023 atau Tahun 2022 diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 3.3 Perbandingan Capaian Kinerja

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024		
			Realiasi	Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	-	-	75,75	78	77,05	98,78
2	Meningkatnya Profesionalisme ASN Perangkat Daerah	Indeks profesionalisme ASN (IP- ASN) Perangkat Daerah	-	-	47,1	50	65,91	131,82
3	Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat dan Tata Kelola Desa	Persentase Desa Mandiri	-	-	9,52%	20,63 %	59,52%	288,51
		Persentase Desa Swasembada	6,349%	13,492%	30,952%	39,68 %	32,53%	81,98

Sumber : Capaian IKU DPMD Tahun 2024

Analisis perbandingan realisasi dan capaian kinerja DPMD pada LKjIP Tahun 2024 dengan tahun 2023, 2022 dan 2021 dilaksanakan berdasarkan Capaian Indikator Sasaran dengan metode analisis perbandingan antara capaian rencana (realisasi) setiap tahunnya. Pada tahun 2023 dilakukan perubahan Tujuan / Sasaran strategis dan Indikator Kinerja pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menyesuaikan dengan

Renstra Perubahan 2024-2026 dan revisi terhadap sasaran strategis dan indikator kinerja utama, yang disesuaikan dengan kondisi aktual yang relevan terhadap perkembangan organisasi.

3.1.4 Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan Tahun 2024 dengan target jangka menengah yang terdapat pada dokumen perencanaan strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa periode 2024 - 2026 diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.4 Kemajuan Capaian Sasaran Strategis

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2024	Target Akhir Rencana Strategis	Tingkat Kemajuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) =4/5*100
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	77,05	80	96,31
2	Meningkatnya Profesionalisme ASN Perangkat Daerah	Indeks profesionalisme ASN (IP- ASN) Perangkat Daerah	65,91	65	101,4
3	Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat dan Tata Kelola Desa	Persentase Desa Mandiri	59,52%	3,97	1.499,24
		Persentase Desa Swasembada	32,53%	51,59	63,05

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2024	Target Akhir Rencana Strategis	Tingkat Kemajuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) =4/5*100

Sumber : Capaian IKU DPMD Tahun 2024

Berdasarkan surat dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / Badan Perencanaan Pembangunan Nasional mengenai penyelarasan RPJMD dengan RPJMN Tahun 2025 – 2045 maka untuk penyusunan Renstra DPMD Tahun 2024 – 2026 dilakukan penyelarasan target capaian Persentase Desa Mandiri untuk Tahun 2025 dan 2026 dimana untuk target Tahun 2025 dan 2026 mengalami pengurangan target yaitu untuk Tahun 2024 sebelum adanya perubahan metode dan indikator perhitungan pemeringkatan Desa Mandiri, target Persentase Desa Mandiri adalah sebesar 20,63% atau 26 Desa namun untuk Tahun 2025 sebesar 3,17 atau 4 Desa dan untuk Tahun 2026 sebesar 3,97% atau 5 Desa, berdasarkan Baseline dan Target Persentase Desa Mandiri per provinsi dimana untuk Kalsel Baseline Desa Mandiri 2025 sebesar 2,62% dan Target Desa Mandiri 2045 sebesar 19,60% . Hal ini disebabkan karena perubahan indikator dan metode dalam perhitungan pemeringkatan Desa, dimana pada Tahun 2024 menggunakan Indeks Desa Membangun (IDM) sedangkan mulai Tahun 2025 persentase desa mandiri sudah menggunakan Indeks Desa. Dalam Indeks Desa, desa dikelompokkan menjadi 5 klasifikasi status (*sangat tertinggal, tertinggal, berkembang, maju dan mandiri*). Apabila di tahun 2045 target Desa Mandiri yang ditetapkan relatif kecil, ada kecenderungan bahwa target di status lainnya seperti Desa Maju dan Desa Berkembang yang

lebih besar. Selain itu, penetapan target di tahun 2045 mempertimbangkan beberapa hal antara lain (a) Karakteristik dan tema pembangunan wilayah; (b) kondisi daerah di tahun *baseline*; (c) kemampuan daerah

Indeks Desa menjadi indikator kinerja pembangunan desa yang universal, sejalan dengan implementasi pemerataan pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045 yang mengamanatkan penyelesaian ketimpangan untuk mencapai salah satu Visi Indonesia Emas 2045, yakni kemiskinan menuju nol persen dan ketimpangan berkurang. Di 2023, BPS mencatat kemiskinan perdesaan mencapai 12,22 persen, di atas kemiskinan perkotaan yakni sebesar 7,29 persen. Untuk itu, mewujudkan pembangunan yang merata tidak hanya menargetkan pengurangan ketimpangan antara Kawasan Barat Indonesia dengan Kawasan Timur Indonesia, tetapi juga menekan ketimpangan antara perkotaan dan perdesaan. “Pembangunan desa dalam Indonesia Emas 2045 dititikberatkan pada pengarusutamaan pembangunan desa yang bersifat lintas sektor dan lintas aktor, menuju kemandirian desa.

3.1.5 Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada)

Berikut merupakan tabel Perbandingan Capaian Kinerja antara Indikator Kinerja Provinsi dan Kabupaten/Kota.

**Tabel 3.5 Perbandingan Capaian dengan
Standar Nasional/Provinsi/ Kabupaten/Kota**

No	Kabupaten	Mandiri	Maju	Berkembang	Tertinggal	Sangat Tertinggal
1	Tanah Laut	62	53	15	0	0
2	Kotabaru	36	81	81	0	0
3	Banjar	86	137	54	0	0
4	Barito Kuala	81	103	11	0	0
5	Tapin	75	51	0	0	0
6	Hulu Sungai Selatan	47	84	13	0	0
7	Hulu Sungai Tengah	93	59	9	0	0
8	Hulu Sungai Utara	82	113	19	0	0
9	Tabalong	90	28	3	0	0
10	Tanah Bumbu	91	47	14	0	0
11	Balangan	68	83	2	0	0
TOTAL		811	839	221	0	0
		1.871				

Sumber: Data Diolah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Selatan, 2024

3.1.6 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.6 Analisis Keberhasilan, Kegagalan, dan Solusi

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi yang dilakukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	78	77,05	98,78	Masih terdapat beberapa hal yang harus diperbaiki dan ditindaklanjuti, meliputi : 1. Perencanaan Kinerja (26,10)	Dari Laporan Hasil Evaluasi, masih harus lebih ditingkatkan nilainya terutama untuk

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi yang dilakukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						2. Pengukuran Kinerja (23,70) 3. Pelaporan Kinerja (11,25) 4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal (16,00)	pengukuran kinerja menjadi kebutuhan dalam mewujudkan kinerja secara efektif dan efisien dan dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan dengan memanfaatkan teknologi yang ada untuk dikembangkan agar dapat menjadi alat media pengukuran kinerja; dan untuk evaluasi akuntabilitas kinerja internal kedepannya diharapkan bisa menggunakan teknologi informasi (aplikasi). Selain itu juga dilakukan monitoring dan

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi yang dilakukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
							evaluasi secara berkala.
2	Meningkatnya Profesionalisme ASN Perangkat Daerah	Indeks profesionalisme ASN (IP-ASN) Perangkat Daerah	50	65,91	131,82	Meningkatnya ASN DPMD dalam mengikuti bimbingan teknis dan pelatihan, menyebabkan nilai IP ASN SKPD menjadi meningkat dibandingkan tahun sebelumnya	Melakukan monitoring dan evaluasi secara bertahap dan dorongan kepada ASN untuk mengikuti bimbingan teknis secara daring untuk mendapatkan nilai pada aplikasi IP-ASN
3	Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat dan Tata Kelola Desa	Persentase Desa Mandiri	20,63%	59,52%	288,51	Banyaknya Desa yang sudah berstatus maju pada Tahun 2023, maka setelah dilakukan sosialisasi dan pembinaan secara langsung ke desa menyebabkan peningkatan status desa menjadi mandiri naik melebihi target 2024	Melakukan sosialisasi langsung ke desa sehingga setiap permasalahan yang ada di desa bisa langsung diatasi
		Persentase Desa Swasembada	39,68%	32,53%	81,98	1. Penginputan pada aplikasi profil desa tidak maksimal 2. Data yang ada di	Melakukan sosialisasi dan pembinaan kepada

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi yang dilakukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						impor dari data sebelumnya dan tidak diperbaharui	perangkat desa agar lebih memperhatikan dalam menginput data pada aplikasi profil desa

Sumber : Capaian IKU DPMD Tahun 2024

3.1.7 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Adapun penyajian efisiensi atas penggunaan sumber daya disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.7 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja			Anggaran			Efisiensi
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran	Realisasi	%	
					(Rp.)	(Rp.)	Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah						
		78	77,05	98,78	9.655.000	9.119.100	94,45	
2	Meningkatnya Profesionalisme ASN Perangkat Daerah	Indeks profesionalisme ASN (IP-ASN) Perangkat Daerah						
		50	65,91	131,82	2.674.835.012	2.605.758.274,	97,42	

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja			Anggaran			Efisiensi
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran	Realisasi	%	
					(Rp.)	(Rp.)	Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat dan Tata Kelola Desa	Persentase Desa Mandiri						
		20,63%	59,52%	288,51	283.321.762	247.922.700	87,51	
		Persentase Desa Swasembada						
		39,68%	32,53%	81,98	23.307.200	13.323.800	57,17	

Tabel dibawah ini merupakan tabel analisis kinerja atas efisiensi penggunaan sumber daya untuk Tahun 2024. Dari seluruh data yang ada pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dapat dikatakan sangat efisiensi karena rata-rata mencapai 100% dari target kinerja yang telah ditetapkan.

Tabel 3.7.1

**Analisis Kinerja Atas Efisiensi Sumber Daya
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2024**

KEPALA					
NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET IKU	REALISASI	CAPAIAN
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	78	77,05	98,78%
2	Meningkatnya ASN Perangkat Daerah	Indeks profesionalisme ASN (IP- ASN) Perangkat Daerah	50	65,91	131,82%
3	Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat dan	Persentase Desa Mandiri	20,63%	59,52%	288,51%

	Tata Kelola Desa	Persentase Desa Swasembada	39,68%	32,53%	81,98%
SEKRETARIS					
NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET IKU	REALISASI	CAPAIAN
1	Meningkatnya capaian LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Nilai Komponen AKIP	78	77,05	100%
2	Meningkatnya kinerja tindak lanjut dari hasil temuan pemeriksaan	Persentase hasil temuan pemeriksaan yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%
3	Meningkatnya Kualitas Kinerja ASN	Persentase ASN dengan capaian kinerja >90%	90%	90%	100%
4	Meningkatnya Pelayanan Keskretariat	Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat	90%	90%	100%
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT					
NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET IKU	REALISASI	CAPAIAN
1	Meningkatnya pemberdayaan lembaga kemasyarakatan desa	Persentase lembaga desa yang berprestasi	10,31%	10,31%	100%
BIDANG PEMERINTAHAN DESA					

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET IKU	REALISASI	CAPAIAN
1	Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa	Persentase desa yang ditata sesuai dengan ketentuan	60%	60%	100%
BIDANG PPUEB					
NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET IKU	REALISASI	CAPAIAN
1	Meningkatnya Pengembangan Lembaga Ekonomi Desa	Persentase Perkembangan Status Bumdes Maju	5%	3%	60%

3.1.8 Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja disertai uraian penjelasan tabel dibawah ini:

Tabel 3.8 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan

N o.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN			

N o.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1			98,78	<u>Kegiatan</u> Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	/KOTA	100	Men unja ng	Berha sil
					Persentase Tindak lanjut Perencanaan Kinerja Atas Rekomendasi dari Mitra Kerja Bappelitbang			
					Persentase Rekomendasi LHE AKIP yang Ditindak Lanjuti			
					Persentase Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Kinerja yang Ditindaklanjuti			
2	Meningkatnya Profesionalisme ASN Perangkat Daerah	Indeks profesional isme ASN (IP- ASN) Perangkat Daerah	131,82	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN /KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH			Sangat

N o.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunj ang/ Tidak Menunj ang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
					KABUPATEN /KOTA	100	Men unja ng	Berha sil
				<i>Kegiatan Adminstras i Umum Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapatka n pelayanan administrasi Kepegawaian dengan baik</i>			
				PROGRAM PEMBERDAY AAN LEMBAGA KEMASYARA KATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKA T HUKUM ADAT	Persentase lembaga desa yang berprestasi	10,31		
					Persentase Perkembanga n Status BUMDes Maju	3		
		<i>Persentase Desa Mandiri</i>	288,51	<i>Kegiatan Pemberdayaa n Lembaga Kemasyarak atan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaa n Desa dan</i>	<i>Persentase kelembagaa n antar desa yang berkerjasa ma</i>	100	Menu njang	Sangat Berhasi 1
	Meningkatnya Keberdayaan				<i>Persentase Lembaga Kemasyara katan Desa yang Aktif</i>	81		

N o.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	Masyarakat dan Tata Kelola Desa			Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota				
					Persentase Bumdes dan Bumdesma yang Aktif	66		
					Persentase desa yang memanfaatkan teknologi tepat guna	5		
				PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang tertata sesuai dengan ketentuan	60	Menu njang	Berhasi 1
					Persentase Status Bumdes	3		
		Persentase Desa Swasemba da	81,98	Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase aparatur desa yang sesuai ketentuan yang berlaku	90		
					Persentase desa yang melakukan pengelolaan keuangan desa sesuai ketentuan	90		
					Persentase desa yang melakukan pengelolaan aset desa sesuai	85		

N o.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menun- jang/ Tidak Menun- jang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
					<i>ketentuan</i>			
					<i>Persentase Bumdes dan Bumdesma yang menghasilk an PADes</i>	54		

Dari hasil pengukuran indikator kinerja dapat diketahui bahwa selama tahun 2024 hasil indikator kinerja utama yang telah ditetapkan telah memenuhi target yang ditetapkan. Berbagai pencapaian target indikator kinerja DPMD Kabupaten Tapin ini merupakan gambaran hasil dari komitmen, dukungan dan keterlibatan semua komponen DPMD Kabupaten Tapin.

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapin khususnya Bidang Pembangunan dan Pengembangan Usaha Ekonomi Desa menyusun Indikator Keberhasilan Kinerja untuk menjadi ukuran serta acuan keberhasilan target kinerja seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, dapat dilihat pada tabel berikut :

NO	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
----	---------	-------------------	--------	-----------

1.	Berkembangnya Lembaga Ekonomi Desa	Persentase BUMDes yang aktif	74%	78%
		Persentase BUMDes menghasilkan Laba	61%	68%
2.	Memfasilitasi dalam Rangka Pemasarakatan Teknologi Tepat Guna Dan Pos Pelayanan Teknologi Pedesaan/Teknologi Tepat Guna (TTG)	Terfasilitasinya Kerjasama dengan Berbagai Pihak dalam Rangka Pemberdayaan Ekonomi	100%	100%

GRAFIK PERKEMBANGAN TARGET BUMDES AKTIF KABUPATEN TAPIN

	TAHUN	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
RENCANA	126	7%	18%	29%	41%	52%	63%	66%	70%	74%	78%
REALISASI		9%	20%	33%	52%	62%	67%	68%	73%	78%	
RENCANA	DESA	9	23	37	51	65	79	84	89	94	99
REALISASI	DESA	12	25	42	65	78	84	86	93	98	

GRAFIK PERKEMBANGAN TARGET PADES BUMDES KABUPATEN TAPIN

	TAHUN	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
RENCANA	126	6%	12%	14%	16%	41%	52%	54%	57%	61%	64%	67%
REALISASI		9%	13%	17%	19%	41%	53%	68%	61%	68%		
RENCANA	DESA	8	15	18	20	51	65	69	73	77	81	85
REALISASI	DESA	11	16	21	24	52	67	86	77	86		

Pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja Persentase BUMDesa yang aktif dan Persentase BUMDesa menghasilkan Laba yang telah dicapai pada tahun 2024, dengan membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir. Untuk tahun pembandingan di mulai tahun 2019, dapat dilihat pada tabel sajian di atas: Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun ke Tahun

Capaian kinerja pada Indikator Kinerja untuk Persentase BUMDesa yang aktif pada semester 1 tahun 2024 tercapai sebesar 78% dari target yang ditetapkan 94 Desa mampu dicapai menjadi 98 Desa dari total 126 Desa dan Persentase BUMDesa yang menghasilkan laba pada semester 1 tahun 2024 tercapai sebesar 68% dari target yang ditetapkan 77 Desa mampu dicapai menjadi 86 Desa dari total 126 Desa yang ada di Kabupaten Tapin serta Terfasilitasinya Kerjasama dengan Berbagai Pihak dalam Rangka Pemberdayaan Ekonomi Pada kegiatan pembangunan dan pengembangan usaha ekonomi Desa pada semester 1 tahun 2024 tercapai sebesar 100% dari target 12 POSYANTEK Kecamatan yang ditetapkan dan 126 Desa sudah terbentuk POSYANTEKDES seluruhnya.

Faktor pendukung tercapainya Indikator Kinerja diatas selain dari Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas terdapat pula faktor-faktor pendukung lainnya, antara lain :

1. Hadirnya inovasi GEPPREK PEDES di tahun 2020 akhir yang visi dan misinya menggerakkan perekonomian Desa dengan memfasilitasi pengembangan kelembagaan ekonomi yang ada di Desa melalui BUMDesa, BUMDesMa, dan POSYANTEK Kecamatan/Desa
2. Adanya pembinaan yang masif dan terstruktur serta berkelanjutan dari Bidang PPUED mulai dari tingkat Kabupaten, Kecamatan sampai ke Desa dengan melibatkan OPD terkait di Kabupaten Tapin dan kerjasama BUMN, BUMD, Perguruan Tinggi dan Swasta
3. Sumber daya aparatur desa, pengelola BUMDesa, BUMDesMa, POSYANTEK Kecamatan/Desa yang semakin membaik melalui kegiatan sosialisasi berupa Rembug BUMDesa/BUMDesMa dengan metode pembinaan, *capacity building*, study tiru, dan bimbingan teknis serta pendampingan Tenaga Profesional Program P3MD dari Kementerian Desa PDTT yang ditugaskan di Kabupaten Tapin. Bidang PPUED juga di dukung anggaran yang bersumber dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten Tapin.

Dari metode-metode penunjang keberhasilan tercapainya indikator kinerja dan faktor penunjang lainnya maka bidang Pembangunan dan Pengembangan Usaha Ekonomi Desa menghasilkan Outcome antara lain:

a. BUMDesa

1. Diraihnya penghargaan dan juara pertama (1) lomba BUMDesa tingkat Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2023 (BUMDesa Mitra Hidayah Mandiri, Desa Bitahan Baru, Kecamatan Lokpaikat)
2. Menjadi BUMDesa pertama di Kalimantan Selatan bahkan di Indonesia yang mampu menjalin kerjasama dengan (RSUD) sebagai penyedia bahan makanan untuk Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul Tahun 2023. (BUMDesa Mandiri Sejahtera, Desa Kakaran, Kecamatan Tapin Utara).

b. BUMDesMa :

Diraihnya penghargaan tingkat Nasional BUMDesMa Inspiratif kategori “Cepat Tumbuh” pada peringatan hari BUMDesa Nasional di Kabupaten Bintan Tahun 2023 dengan unit usaha PERTASHOP yang diraih oleh (Badan Usaha Milik Desa Bersama Surya Maju Abadi Kecamatan Hatungun).

Identifikasi isu merupakan proses pengamatan terhadap masalah yang timbul dari hasil kegiatan yang telah dilaksanakan untuk menentukan rencana tindak lanjut dari suatu masalah. Berikut ini isu masalah yang paling banyak ditemukan pada 12 Kecamatan dalam kegiatan Pembinaan Pengembangan BUMDesa :

1. Mayoritas BUMDes masih belum memiliki legalitas hukum
2. Pengelola BUMDes tidak aktif dan pasif dalam

pengelolaan BUMDes, sehingga kegiatan usaha BUMDes tidak berjalan

3. Mayoritas Desa belum melakukan penyertaan modal kepada BUMDes di Tahun Anggaran 2024

Identifikasi isu ini menggunakan teknik analisis USG dengan menggunakan rentang penilaian (1-5). Dalam teknik USG, ada beberapa hal yang harus diperhatikan yaitu:

NO	Identifikasi Isu	riteria			Total	Peringkat
		U	S	G		
1	Mayoritas BUMDes masih belum memiliki legalitas hukum	5	5	5	15	1
2	Pengelola BUMDes tidak aktif dan pasif dalam pengelolaan BUMDes	5	3	5	13	2
3	Mayoritas Desa belum melakukan penyertaan modal kepada BUMDes di Tahun Anggaran 2024	3	5	3	11	3

Skala Likert: (5: Sangat besar, 4: Besar, 3: Sedang, 2: Kecil, 1: Sangat kecil)

- **Urgency** yaitu mendesak atau tidak isu tersebut untuk di bahas, dianalisis dan diselesaikan.
- **Seriousness** yaitu tingkat keseriusan dari isu yang harus dibahas dikaitkan dengan akibat yang akan ditimbulkan.
- **Growth** yaitu tingkat perkembangan isu terkait apakah masalah tersebut dapat berkembang sedemikian rupa sehingga sulit untuk dicegah apabila tidak ditangani segera.

Berdasarkan hasil analisis USG diatas, maka diperoleh isu yang

paling penting untuk diselesaikan yaitu **Mayoritas BUMDes masih belum memiliki legalitas hukum**. Hasil analisis ini akan kami jadikan fokus masalah dalam penyusunan rencana tindak lanjut kedepannya.

Pada Tanggal 14 Agustus 2024 yang bertepatan dengan Ulang Tahun Provinsi Kalimantan Selatan atau Tahun terakhir pengklasifikasian Desa berdasarkan versi Indeks Desa Membangun (IDM), Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi memberikan 2 (dua) kategori Penghargaan bagi seluruh Kabupaten yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan, yakni:

1. Lencana Bakti Desa Madya

Penghargaan ini diberikan kepada Kabupaten yang seluruh Desanya hanya terdiri dari 2 (dua) strata, yakni Desa “Mandiri” dan “Maju”

2. Lencana Bakti Desa Pertama

Penghargaan yang diterima oleh Kabupaten yang berhasil mengentaskan Desa berstatus “Tertinggal” dan “Sangat Tertinggal”

Kabupaten Tapin menjadi satu-satunya Kabupaten di Provinsi Kal-Sel yang berhasil meraih Penghargaan Lencana Bakti Desa Madya dikarenakan tidak lagi mempunyai Desa berstatus “Berkembang” yang diserahkan oleh Gubernur Provinsi Kal-Sel kepada PJ Bupati Tapin dan disaksikan langsung oleh Perwakilan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang berlokasi di Tugu 0 Kilometer Banjarmasin.

Keberhasilan ini diraih oleh pergerakan Bidang Pemberdayaan Masyarakat yang melaksanakan sosialisasi Desa Mandiri kepada Desa-Desa yang berpotensi naik status di Tahun 2024 baik dari status “Berkembang” ke “Maju” maupun dari status “Maju” ke “Mandiri”. Hal ini dilaksanakan selama 6 (enam) bulan pada bulan Juli s.d. Desember 2023 terhadap 60 (enam puluh) Desa yang tersebar di Kabupaten Tapin. Hal tersebut dilaksanakan setelah hasil yang mengecewakan didapat pada Tahun 2023 dimana Kabupaten Tapin menjadi Kabupaten yang paling sedikit menyumbang Desa Mandiri di Provinsi Kalimantan Selatan sebanyak 12 (dua belas) Desa, dimana seharusnya pada Tahun tersebut Kabupaten Tapin diprediksi paling sedikit memiliki 28 (dua puluh delapan) Desa Mandiri.

Setelah dilakukan analisa terhadap kejadian tersebut diatas, faktor yang paling berpengaruh adalah pola pikir para Kepala Desa yang salah dalam mendefinisikan “Desa Mandiri”. Meskipun sering diberikan informasi tentang pengertian Desa Mandiri pada acara-acara tingkat Kabupaten oleh Kepala Dinas PMD, banyak para Kepala Desa yang mempunyai asumsi sendiri yang salah tentang persepsi Desa Mandiri selain suasana yang tidak kondusif sehingga saat penyampaian informasi tidak dapat diterima secara optimal. Berdasarkan hasil yang tidak memuaskan tersebut, akhirnya dilaksanakanlah Sosialisasi Desa Mandiri pada tingkat Desa yang dilaksanakan di Kantor Desa dengan menghadirkan jumlah peserta yang terbatas yakni: Kepala Desa dan

Sekretaris Desa, Perwakilan BPD dan tokoh masyarakat serta Pendamping Desa yang bersangkutan untuk menjaga suasana yang kondusif agar tercipta hasil yang diharapkan. Dan akhirnya pada Tahun 2024 didapatkan hasil dari kerja keras yang sudah dilaksanakan dengan diterimanya Penghargaan tersebut diatas.









PEMERINGKATAN DESA KABUPATEN TAPIN
HASIL PEMUTAKHIRAN DATA IDM
TAHUN 2024

No	Nama Kecamatan	Nama Desa	Daftar Nilai & Status				
			IKS	IKE	IKL	IDM	Status
1	Piani	Miawa	0,9429	0,8333	0,9333	0,9032	Mandiri
2	Lokpaikat	Binderang	0,9257	0,8333	0,8667	0,8752	Mandiri
3	Candi Laras Selatan	Baringin A	0,8914	0,8500	0,8667	0,8694	Mandiri
4	Binuang	Pulau Pinang	0,9200	0,7333	0,9333	0,8622	Mandiri
5	Salam Babaris	Salam Babaris	0,9371	0,8333	0,8000	0,8568	Mandiri
6	Salam Babaris	Pantai Cabe	0,8800	0,8167	0,8667	0,8544	Mandiri
7	Binuang	Pualam Sari	0,9429	0,7500	0,8667	0,8532	Mandiri
8	Lokpaikat	Bataratat	0,8857	0,7833	0,8667	0,8452	Mandiri
9	Lokpaikat	Lokpaikat	0,8686	0,7833	0,8667	0,8395	Mandiri
10	Bungur	Bungur	0,8857	0,6833	0,9333	0,8341	Mandiri
11	Tapin Utara	Perintis Raya	0,8629	0,7667	0,8667	0,8321	Mandiri
12	Hatungun	Hatungun	0,8514	0,7667	0,8667	0,8283	Mandiri
13	Tapin Tengah	Pematang Karangan Hulu	0,8457	0,7667	0,8667	0,8263	Mandiri
14	Tapin Utara	Banua Halat Kiri	0,8057	0,7333	0,9333	0,8241	Mandiri
15	Lokpaikat	Ayunan Papan	0,8514	0,7500	0,8667	0,8227	Mandiri
16	Bungur	Banua Padang	0,8343	0,7667	0,8667	0,8225	Mandiri
17	Tapin Tengah	Serawi	0,8171	0,7833	0,8667	0,8224	Mandiri
18	Candi Laras Selatan	Pabaungan Hilir	0,8171	0,7833	0,8667	0,8224	Mandiri
19	Tapin Tengah	Hiyung	0,7657	0,7667	0,9333	0,8219	Mandiri
20	Candi Laras Utara	Margasari Hilir	0,8800	0,7167	0,8667	0,8211	Mandiri
21	Tapin Utara	Antasari Hilir	0,8457	0,7500	0,8667	0,8208	Mandiri
22	Bakarangan	Bakarangan	0,8457	0,7500	0,8667	0,8208	Mandiri
23	Bungur	Bungur Baru	0,8457	0,7500	0,8667	0,8208	Mandiri
24	Hatungun	Batu Hapu	0,8457	0,7500	0,8667	0,8208	Mandiri
25	Tapin Utara	Antasari	0,8286	0,7667	0,8667	0,8206	Mandiri
26	Bungur	Purut	0,8286	0,7667	0,8667	0,8206	Mandiri
27	Bungur	Banua Padang Hilir	0,8114	0,7833	0,8667	0,8205	Mandiri
28	Hatungun	Tarungin	0,8114	0,7833	0,8667	0,8205	Mandiri
29	Salam Babaris	Suato Lama	0,8743	0,7833	0,8000	0,8192	Mandiri
30	Binuang	A. Yani Pura	0,8571	0,7333	0,8667	0,8190	Mandiri
31	Binuang	Mekar Sari	0,8571	0,7333	0,8667	0,8190	Mandiri
32	Tapin Tengah	Mandurian	0,8400	0,7500	0,8667	0,8189	Mandiri
33	Tapin Tengah	Pematang Karangan Hilir	0,8400	0,7500	0,8667	0,8189	Mandiri
34	Tapin Utara	Lumbu Raya	0,8400	0,7500	0,8667	0,8189	Mandiri
35	Salam Babaris	Suato Baru	0,8400	0,7500	0,8667	0,8189	Mandiri
36	Tapin Selatan	Tatakan	0,8229	0,7667	0,8667	0,8187	Mandiri
37	Tapin Selatan	Lawahan	0,8229	0,7667	0,8667	0,8187	Mandiri
38	Bakarangan	Tangkawang Baru	0,8229	0,7667	0,8667	0,8187	Mandiri
39	Buneur	Shabah	0,8229	0,7667	0,8667	0,8187	Mandiri

40	Lokpaikat	Parandakan	0,8229	0,7667	0,8667	0,8187	Mandiri
41	Lokpaikat	Bitahan Baru	0,8229	0,7667	0,8667	0,8187	Mandiri
42	Salam Babaris	Kambang Habang Lama	0,8229	0,7667	0,8667	0,8187	Mandiri
43	Bakarangan	Gadung Keramat	0,8057	0,7167	0,9333	0,8186	Mandiri
44	Bungur	Kalumpang	0,8057	0,7833	0,8667	0,8186	Mandiri
45	Binuang	Padang Sari	0,8514	0,7333	0,8667	0,8171	Mandiri
46	Tapin Selatan	Sawang	0,8514	0,7333	0,8667	0,8171	Mandiri
47	Tapin Tengah	Pandahan	0,8514	0,7333	0,8667	0,8171	Mandiri
48	Piani	Baramban	0,8514	0,7333	0,8667	0,8171	Mandiri
49	Piani	Balawaian	0,8514	0,7333	0,8667	0,8171	Mandiri
50	Hatungun	Kambang Kuning	0,8514	0,7333	0,8667	0,8171	Mandiri
51	Tapin Tengah	Pematang Karangan	0,8343	0,6833	0,9333	0,8170	Mandiri
52	Tapin Tengah	Mandurian Hilir	0,8343	0,7500	0,8667	0,8170	Mandiri
53	Bungur	Rantau Bujur	0,8343	0,6833	0,9333	0,8170	Mandiri
54	Lokpaikat	Budi Mulya	0,8343	0,7500	0,8667	0,8170	Mandiri
55	Tapin Tengah	Andhika	0,8343	0,6833	0,9333	0,8170	Mandiri
56	Candi Laras Selatan	Margasari Hulu	0,8171	0,7667	0,8667	0,8168	Mandiri
57	Binuang	Tungkap	0,8171	0,7667	0,8667	0,8168	Mandiri
58	Tapin Selatan	Timbaan	0,8171	0,7667	0,8667	0,8168	Mandiri
59	Tapin Selatan	Rumintin	0,8171	0,7667	0,8667	0,8168	Mandiri
60	Tapin Selatan	Harapan Masa	0,8171	0,7667	0,8667	0,8168	Mandiri
61	Tapin Selatan	Hatiwin	0,8171	0,7667	0,8667	0,8168	Mandiri
62	Tapin Tengah	Labung	0,8171	0,7000	0,9333	0,8168	Mandiri
63	Tapin Tengah	Tirik	0,8171	0,7667	0,8667	0,8168	Mandiri
64	Candi Laras Selatan	Marampiaou	0,8171	0,7667	0,8667	0,8168	Mandiri
65	Bakarangan	Parigi	0,8171	0,7667	0,8667	0,8168	Mandiri
66	Bungur	Linuh	0,8171	0,7667	0,8667	0,8168	Mandiri
67	Lokpaikat	Puncak Harapan	0,8171	0,7667	0,8667	0,8168	Mandiri
68	Tapin Selatan	Cempaka	0,8000	0,7833	0,8667	0,8167	Mandiri
69	Tapin Tengah	Pandulangan	0,8000	0,7167	0,9333	0,8167	Mandiri
70	Candi Laras Utara	Pariok	0,8000	0,7833	0,8667	0,8167	Mandiri
71	Bakarangan	Parigi Kacil	0,8000	0,7833	0,8667	0,8167	Mandiri
72	Bakarangan	Waringin	0,8000	0,7167	0,9333	0,8167	Mandiri
73	Hatungun	Matang Batas	0,8000	0,7833	0,8667	0,8167	Mandiri
74	Bakarangan	Tangkawang	0,7829	0,7333	0,9333	0,8165	Mandiri
75	Candi Laras Selatan	Pabaungan Hulu	0,7829	0,8000	0,8667	0,8165	Mandiri
76	Tapin Utara	Jingah Babaris	0,8514	0,7833	0,8000	0,8116	Maju
77	Tapin Selatan	Tandui	0,8171	0,7500	0,8667	0,8113	Maju
78	Bakarangan	Paul	0,8057	0,6833	0,9333	0,8075	Maju
79	Bakarangan	Gadung	0,7657	0,7167	0,9333	0,8052	Maju
80	Candi Laras Selatan	Baringin B	0,8457	0,6833	0,8667	0,7986	Maju
81	Tapin Utara	Kakaran	0,8286	0,7667	0,8000	0,7984	Maju
82	Candi Laras Selatan	Marampiaou Hilir	0,8229	0,7000	0,8667	0,7965	Maju
83	Bungur	Hangui	0,7886	0,6667	0,9333	0,7962	Maju
84	Tapin Utara	Keramat	0,7714	0,7500	0,8667	0,7960	Maju

85	Binuang	Pulau Pinang Utara	0,9314	0,7833	0,6667	0,7938	Maju
86	Tapin Selatan	Suato Tatakan	0,8457	0,6667	0,8667	0,7930	Maju
87	Tapin Tengah	Papagan Makmur	0,8171	0,6833	0,8667	0,7890	Maju
88	Bungur	Timbung	0,7714	0,7167	0,8667	0,7849	Maju
89	Candi Laras Utara	Sungai Puting	0,8457	0,6167	0,8667	0,7763	Maju
90	Tapin Utara	Banua Hanyar Hulu	0,8286	0,7000	0,8000	0,7762	Maju
91	Bungur	Paring Guling	0,7886	0,8000	0,7333	0,7740	Maju
92	Binuang	Gunung Batu	0,8343	0,6167	0,8667	0,7725	Maju
93	Tapin Utara	Banua Halat Kanan	0,8000	0,7167	0,8000	0,7722	Maju
94	Candi Laras Utara	Keladan	0,7486	0,7000	0,8667	0,7717	Maju
95	Candi Laras Selatan	Sungai Rutas	0,8286	0,8167	0,6667	0,7706	Maju
96	Tapin Utara	Banua Hanyar	0,8114	0,7667	0,7333	0,7705	Maju
97	Tapin Tengah	Sukaramai	0,7714	0,6667	0,8667	0,7683	Maju
98	Candi Laras Selatan	Sungai Rutas Hulu	0,7943	0,8333	0,6667	0,7648	Maju
99	Candi Laras Selatan	Candi Laras	0,8171	0,6000	0,8667	0,7613	Maju
100	Tapin Tengah	Batang Lantik	0,8343	0,7667	0,6667	0,7559	Maju
101	Tapin Utara	Badaun	0,8171	0,7167	0,7333	0,7557	Maju
102	Candi Laras Utara	Batalas	0,8000	0,6000	0,8667	0,7556	Maju
103	Tapin Tengah	Sungai Bahalang	0,8229	0,7667	0,6667	0,7521	Maju
104	Bakarangan	Masta	0,7143	0,6667	0,8667	0,7492	Maju
105	Salam Babaris	Kambang Habang Baru	0,8286	0,7500	0,6667	0,7484	Maju
106	Piani	Buniin Jaya	0,8743	0,7000	0,6667	0,7470	Maju
107	Piani	Pipitak Jaya	0,8057	0,7667	0,6667	0,7463	Maju
108	Bakarangan	Bundung	0,8057	0,7500	0,6667	0,7408	Maju
109	Hatungun	Bagak	0,8114	0,7333	0,6667	0,7371	Maju
110	Tapin Tengah	Kepayang	0,8057	0,7333	0,6667	0,7352	Maju
111	Bakarangan	Ketapang	0,8057	0,7333	0,6667	0,7352	Maju
112	Piani	Batung	0,7829	0,7500	0,6667	0,7332	Maju
113	Candi Laras Selatan	Baulin	0,7943	0,7333	0,6667	0,7314	Maju
114	Hatungun	Burakai	0,8171	0,7000	0,6667	0,7279	Maju
115	Hatungun	Asam Randah	0,8171	0,7000	0,6667	0,7279	Maju
116	Candi Laras Utara	Buas-Buas Hilir	0,7086	0,6667	0,8000	0,7251	Maju
117	Candi Laras Utara	Sungai Salai Hilir	0,7486	0,5500	0,8667	0,7217	Maju
118	Candi Laras Utara	Teluk Haur	0,6971	0,8000	0,6667	0,7213	Maju
119	Candi Laras Utara	Buas-Buas	0,7486	0,6667	0,7333	0,7162	Maju
120	Candi Laras Utara	Sungai Salai	0,7314	0,5500	0,8667	0,7160	Maju
121	Piani	Batu Ampar	0,8057	0,6667	0,6667	0,7130	Maju
122	Candi Laras Utara	Rawana Hulu	0,6971	0,5667	0,8667	0,7102	Maju
123	Candi Laras Utara	Rawana	0,6457	0,6167	0,8667	0,7097	Maju
124	Candi Laras Selatan	Pabaungan Pantai	0,7771	0,6833	0,6667	0,7090	Maju
125	Candi Laras Utara	Sawaja	0,7257	0,5333	0,8667	0,7086	Maju
126	Piani	Harakit	0,8229	0,5000	0,8000	0,7076	Maju

3.2 Realisasi Anggaran

Dalam realisasi anggaran memuat penjelasan terkait anggaran yang digunakan serta tingkat efisiensi penggunaan sumber daya untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen Perjanjian Kinerja diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3.9 Capaian Anggaran Program dan Kegiatan

No	Program/ Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA	6.346.942.224	6.173.212.130	97,26
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.655.000	9.119.100	94,45
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	9.655.000	9.119.100	94,45
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.294.981.281	3.198.061.218	97,06
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.287.268.281	3.190.717.618	97,06
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4.092.000	4.014.600	98,11
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	3.621.000	3.329.000	91,94
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.674.835.012	2.605.758.274	97,42
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	46.538.100	46.472.500	99,86
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	128.334.042	128.254.300	99,94
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	19.955.000	19.803.400	99,24

	Penyediaan Bahan/Material	19.600.870	19.600.870	100,00
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	3.495.000	3.465.000	99,14
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.456.912.000	2.388.162.204	97,20
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	63.049.000	60.979.000	96,72
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	63.049.000	60.979.000	96,72
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	221.526.852	217.371.439	98,12
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7.850.000	7.850.000	100,00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	62.512.852	58.927.679	94,26
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	151.164.000	150.593.760	99,62
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urus Pemerintah Daerah	82.895.079	81.923.099	98,83
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	75.979.300	75.008.099	98,72
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.915.779	6.915.000	99,99
II	PROGRAM PENATAAN DESA	16.379.300	15.969.000	97,50
	Penyelenggaraan Penataan Desa	16.379.300	15.969.000	97,50
	Fasilitas Tata Wilayah Desa	339.900	300.000	88,26
	Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa	16.039.400	15.669.000	97,69
III	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	71.782.277.320	70.934.144.554	98,82
	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa	71.782.277.320	70.934.144.554	98,82
	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	1.898.134.740	1.844.775.304	97,19
	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	20.686.050	15.101.200	73,00

	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	69.863.456.530	69.074.268.050	98,87
IV	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	2.497.920.008	2.313.215.700	92,61
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	2.497.920.008	2.313.215.700	92,61
	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	686.898.487	655.250.100	95,39
	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	65.928.950	45.916.900	69,65
	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	194.329.800	193.927.800	99,79
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	185.706.200	175.961.500	94,75
	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	228.785.400	225.690.700	98,65
	Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	37.546.950	9.997.500	26,63
	Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	22.137.470	21.443.200	96,86
	Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDesa dan Lembaga Kerja Sama Antar Desa	607.570.900	604.239.000	99,45
	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa	135.103.051	118.240.000	87,52
	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	21.993.100	8.479.600	38,56
	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	23.307.200	13.323.800	57,17
	Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	18.887.500	17.437.600	92,32
	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	24.184.750	16.689.300	69,01
	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	93.195.350	79.459.600	85,26

	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	77.653.200	60.339.800	77,70
	Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	13.195.500	9.723.300	73,69
	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	61.496.200	57.096.000	92,84
V	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	1.150.808.182	1.084.289.520	94,22
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.150.808.182	1.084.289.520	94,22
	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT,RW,PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	283.321.762	247.922.700	87,51
	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT,RW,PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	252.972.750	228.516.000	90,33
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	193.985.200	189.041.500	97,45
	Fasilitasi Pemerintahan Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	420.528.470	418.809.320	99,59
	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	0,00	0,00	0,00

	Jumlah	81.794.327.034	80.520.830.904	98,44
--	---------------	-----------------------	-----------------------	--------------

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2024 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2024 ini. Penyusunan LKjIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

Laporan Kinerja Instansi pemerintah (LKjIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2024 ini dapat menggambarkan kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan. Hasil laporan kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2024 ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa memiliki 3 sasaran strategis dan 4 indikator kinerja dengan 2 indikator kinerja tercapai dan 2 indikator kinerja tidak tercapai.
2. Faktor penghambat keberhasilan kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah
 - Masih kurangnya pemahaman tentang SAKIP
 - Pengukuran kinerja dan evaluasi internal kinerja menjadi kebutuhan dalam mewujudkan kinerja secara efektif dan efisien dan dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan namun belum bisa memanfaatkan teknologi yang ada untuk dikembangkan agar dapat menjadi alat media pengukuran kinerja

- Penginputan pada aplikasi profil desa tidak maksimal disebabkan karena data yang ada di impor dari data sebelumnya dan tidak diperbaharui
- Mayoritas BUMDes masih belum memiliki legalitas hukum
- Pengelola BUMDes tidak aktif dan pasif dalam pengelolaan BUMDes, sehingga kegiatan usaha BUMDes tidak berjalan
- Mayoritas Desa belum melakukan penyertaan modal kepada BUMDes di Tahun Anggaran 2024

Rekomendasi langkah-langkah perbaikan kedepan yang perlu dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Nilai SAKIP
2. Melakukan monitoring dan evaluasi secara bertahap dan dorongan kepada ASN untuk mengikuti bimbingan teknis secara daring untuk mendapatkan nilai pada aplikasi IP-ASN
3. Peningkatan sosialisasi kepada perangkat desa dalam upaya meningkatkan status desa
4. Melakukan sosialisasi dan pembinaan kepada perangkat desa agar lebih memperhatikan dalam menginput data pada aplikasi profil desa
5. Melakukan sosialisasi langsung ke desa sehingga setiap permasalahan yang ada di desa bisa langsung diatasi
6. Pembinaan yang masif dan terstruktur serta berkelanjutan

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa kepada pihak-pihak terkait baik sebagai *stakeholder* ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Perjanjian Kinerja Perubahan Kepala DPMD Tahun 2024

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN TAPIN



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Drs. Rahmadi

Jabatan : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Tapin

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Muhammad Syarifuddin, M.Pd

Jabatan : Pj. Bupati Tapin

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.


Pihak Kedua,
Muhammad Syarifuddin, M.Pd

Rantau, 15 Februari 2024
Pihak Pertama,

Drs. Rahmadi
NIP. 19760302 199412 1 001

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA
TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH : DPMD

TAHUN ANGGARAN : 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	78,00
2	Meningkatnya Profesionalisme ASN Perangkat Daerah	Indeks Profesionalisme ASN (IP-ASN) Perangkat Daerah	50
3	Meningkatnya keberdayaan masyarakat dan tata kelola desa	Persentase Desa Mandiri	20,63%
		Persentase Desa Swasembada	39,68%

No	Program	Anggaran	Ket
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 4.830.899.155	
2.	Program Penataan Desa	Rp. 76.465.200	
3.	Program Peningkatan Kerjasama Desa	Rp. 51.743.957.660	
4.	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Rp. 4.905.407.407	
5.	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga adat dan Masyarakat Hukum Adat	Rp. 1.042.825.400	
Jumlah Anggaran		Rp. 62.599.554.822	

Rantau, 15 Februari 2024

Pj. Bupati Tapin,



Muhammad Syarifuddin, M.Pd

Kepala DPMD,



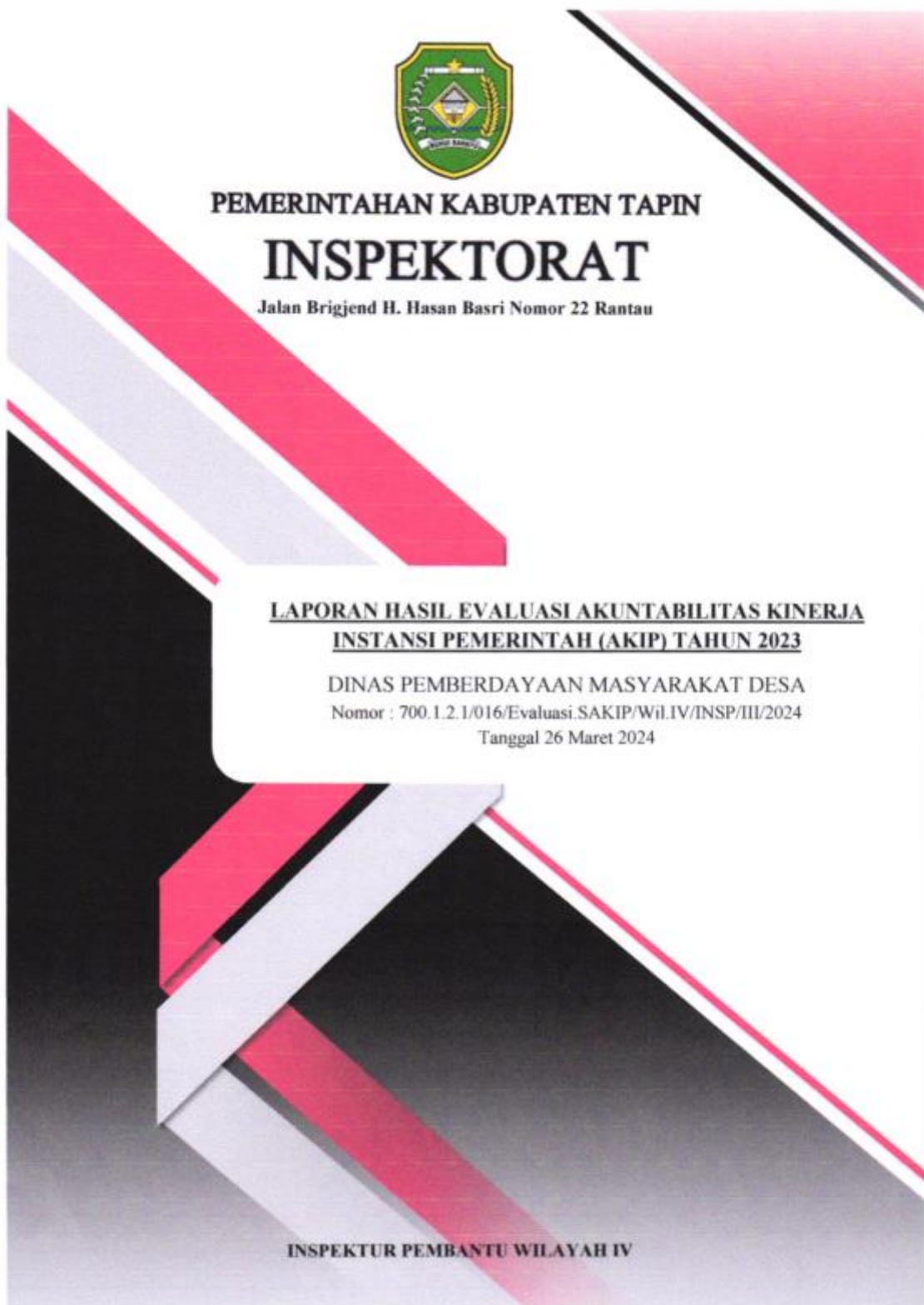
Drs. Rahmadi

NIP. 19760302 199412 1 001

Lampiran 2. Matriks Renstra 5 Tahun

NO.	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN PADA TAHUN KE-		
		2022	2023	2024	2025	2026
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7
1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	-	77,05	78	79	80
	Nilai Komponen AKIP					
	• Perencanaan Kinerja	-	28	28,46	29	29,2
	• Pengukuran Kinerja	-	18,79	18,95	19	19,35
	• Pelaporan Kinerja	-	13,21	13,25	13,3	13,5
	• Evaluasi Internal	-	17,05	17,34	17,7	17,95
2	Indeks Profesionalisme ASN (IP-ASN) Perangkat Daerah	-	-	50	60	65
3	Persentase Desa Mandiri	0,794	2,38	20,63	3,17	3,97
4	Persentase Desa Swasembada	-	13,492	39,68	47,62	51,59

Lampiran 3. LHE Sakip DPMD Tahun 2024





PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
INSPEKTORAT
Jalan Brigjend. H. Hasan Basri No. 22 Telp. (0517) 31601 Fax (0517) 31601
RANTAU

Nomor : 700.1.2.1/016/ Eva.SAKIP/ Wil.IV/INSP/III/2024

Rantau, 26 Maret 2024

Hal : Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(AKIP) Tahun 2023

Kepada
Yth. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
Kabupaten Tapin
di
Rantau

Dengan ini kami sampaikan hasil evaluasi AKIP Tahun 2023 pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Tapin, dengan uraian sebagai berikut :

1. Pendahuluan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), kami telah melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Tapin. Pelaksanaan evaluasi tahun 2023 ini berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Tujuan evaluasi adalah untuk mengetahui sejauh mana Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil (*result oriented government*). Secara khusus evaluasi AKIP bertujuan untuk : (a) memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP; (b) menilai tingkat implementasi SAKIP ; (c) menilai tingkat akuntabilitas kinerja; (d) memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP; (e) memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

Ruang lingkup evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah meliputi penilaian kualitas perencanaan kinerja, penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan, penilaian pelaporan kinerja, penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal, dan penilaian capaian kinerja atas *output* maupun *outcome* serta kinerja lainnya pada level pemerintah daerah maupun Perangkat Daerah (PD).

Pelaksanaan evaluasi AKIP menggunakan kombinasi metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan mempertimbangkan kepraktisan dan kemanfaatan yang disesuaikan dengan tujuan evaluasi serta mempertimbangkan kendala yang ada. Langkah praktis diambil agar lebih cepat memberikan petunjuk untuk perbaikan implementasi AKIP, sehingga dapat menghasilkan rekomendasi untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja.

2. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Tapin berupaya dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi AKIP tahun sebelumnya yaitu tahun 2022, sebagai berikut :

- a. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Tapin akan terus berusaha memperbaiki dan meningkatkan system kinerja yang sudah untuk ada, untuk mendapatkan nilai yang lebih baik
- b. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Tapin akan terus berusaha meningkatkan aplikasi yang digunakan sampai pada capaian kinerja yang tidak terbatas pada pengumpulan data saja untuk meningkatkan nilai pada pengukuran kinerja dan memanfaatkan hasil monitoring capaian kinerja untuk menentukan Tingkat besaran organisasi dan mengifisienkan penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja.
- c. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Tapin akan terus meningkatkan kualitas penyusunan laporan kinerja sesuai dengan standart.
- d. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Tapin akan memanfaatkan informasi dalam LKIP untuk penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya.
- e. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Tapin akan memanfaatkan hasil kinerja masing-masing bidang guna meningkatkan pencapaian kinerja.
- f. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Tapin akan memanfaatkan hasil evaluasi kinerja internal untuk peningkatan akuntabilitas kinerja.
- g. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Tapin akan memanfaatkan hasil evaluasi kinerja internal untuk mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja.

3. Hasil Evaluasi

Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Tapin menunjukkan nilai sebesar **77,05** dengan predikat "**sangat baik**", yaitu terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/ koordinator.

Rincian hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut :

No	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai
		2023	2023
1.	Perencanaan Kinerja	30	26,10
2.	Pengukuran Kinerja	30	23,70
3.	Pelaporan Kinerja	15	11,25
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	16,00
	Nilai Hasil Evaluasi	100	77,05
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		BB

Kami sungguh mengapresiasi pencapaian tingkat akuntabilitas kinerja tahun 2023 di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Tapin.

Penjelasan lebih lanjut atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja tahun 2023 pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Tapin sebagai berikut :

1) Perencanaan Kinerja

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Tapin telah menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Perjanjian Kinerja (PK). Adapun perencanaan kinerja, mengacu pada Peraturan Bupati Tapin Nomor 27 tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. Kriteria penilaian Perencanaan kinerja telah terpenuhi dan terdapat beberapa upaya yang bisa dihargai setidaknya dipertahankan dalam (1) satu tahun terakhir. Dokumen Perencanaan kinerja telah menggunakan penyelarasan (cascading) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting).

2) Pengukuran Kinerja

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Tapin telah menyusun PK dan rencana aksi sebagai dasar pengukuran kinerja. Pengumpulan kinerja dilakukan secara berkala (triwulan) melalui aplikasi E-Sakip. Namun saat ini aplikasi E-Sakip tidak dapat dijadikan alat /media teknologi pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja dilakukan dengan monitoring secara berkala mulai dari kinerja pada level atas sampai dengan level individu.

3) Pelaporan Kinerja

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Tapin telah menyusun laporan kinerja tahun 2023. Dalam penyusunan laporan kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Tapin mempedomani Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja yang telah disusun

menggambarkan kinerja, memenuhi standar kualitas atas pencapaian kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan serta upaya perbaikan.

4) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Telah ada pedoman formal atas evaluasi AKIP di lingkungan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin, yaitu Peraturan Bupati Tapin Nomor 16 Tahun 2023 Tentang Pedoman Evaluasi AKIP. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Tapin melaksanakan evaluasi akuntabilitas kinerja internal baik melalui monev berkala maupun lembar evaluasi mandiri. Namun evaluasi akuntabilitas kinerja internal belum dilaksanakan menggunakan teknologi informasi (aplikasi);

4. Rekomendasi

Berdasarkan uraian di atas serta dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan akuntabilitas kinerja, kami merekomendasikan kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Tapin beberapa hal sebagai berikut :

- a. Agar pengukuran kinerja menjadi kebutuhan dalam mewujudkan kinerja secara efektif dan efisien dan dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan dengan memanfaatkan teknologi yang ada untuk dikembangkan agar dapat menjadi alat/ media pengukuran kinerja;
- b. Agar evaluasi akuntabilitas kinerja internal menggunakan teknologi informasi (aplikasi).

Demikian disampaikan hasil evaluasi AKIP sebagai penerapan manajemen kinerja. Kami menghargai upaya yang telah dilakukan dalam implementasi AKIP di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Tapin. Terhadap hasil evaluasi yang telah disampaikan, kami mengharapkan agar Saudara beserta seluruh jajaran memberikan perhatian yang lebih besar pada upaya implementasi AKIP di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Tapin dan menindaklanjuti rekomendasi yang telah kami sampaikan.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami sampaikan terima kasih.

Inspektur,

Unda Absori, SH., MH
NIP. 19700722 200501 1 013

Lampiran 4. Tindak Lanjut LHE Sakip DPMD Tahun 2023

TINDAK LANJUT

LAPORAN HASIL EVALUASI AKIP TAHUN 2023

Nomor : 700.1.2/016/EVALUASI SAKIP/Wil.IV/INSP/III/2024

Tanggal : 26 Maret 2024

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
(DPMD)
KABUPATEN TAPIN



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Jalan SPG Nomor 5 Rantau 71114 Kalimantan Selatan
Telp./Fax (0517) 31062/E-mail : dpmDKabTapin@gmail.com

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Tapin Tahun 2023 Nomor 700.1.2/016/EVALUASI SAKIP/WI.IV/INSP/III/2024 tanggal 26 Maret 2024, maka disampaikan hal-hal sebagai berikut :

Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapin menunjukkan nilai sebesar 77,05 dengan predikat “ Sangat Baik ” yaitu terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki system manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/ koordinator.

Adapun uraian rincian hasil evaluasi berdasarkan komponen dapat dilihat pada tabel berikut ini :

NO	Komponen yang Dinilai	Bobot	Hasil Evaluasi Tahun 2021
1	Perencanaan Kinerja	30	26,10
2	Pengukuran Kinerja	30	23,70
3	Pelaporan Kinerja	15	11,25
4	Evaluasi Akuntabilitas	25	16,00
	Nilai Hasil Evaluasi	100	77,05
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		BB

Dari hasil evaluasi SAKIP Tahun 2023 ini, masih terdapat beberapa hal yang dianggap perlu mendapat penyempurnaan. Berikut merupakan rekomendasi dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan akuntabilitas kinerja pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapin guna perbaikan nilai untuk tahun-tahun selanjutnya.

- a. Agar pengukuran kinerja menjadi kebutuhan dalam mewujudkan kinerja secara efektif dan efisien dan dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan dengan memanfaatkan teknologi yang ada untuk dikembangkan agar dapat menjadi alat/ media pengukuran kinerja
- b. Agar evaluasi kinerja internal menggunakan teknologi informasi

Tindak lanjut dari hasil rekomendasi diatas maka dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa memberikan tanggapan atau tindak lanjut dari rekomendasi tersebut yaitu:

- a. Dalam pengukuran kinerja DPMD telah menyusun PK dan rencana aksi sebagai dasar pengukuran kinerja. Pengumpulan kinerja dilakukan secara berkala (triwulan) melalui aplikasi E-Sakip. Namun saat ini aplikasi E-Sakip tidak dapat dijadikan alat / media teknologi pengukuran kinerja. Dan aplikasi E-Sakip digunakan oleh seluruh SKPD yang ada di Kabupaten Tapin. Namun belum bisa dijadikan dasar dalam mengukur kinerja yang ada di SKPD masing-masing. Kedepannya diharapkan dilakukan pengembangan aplikasi E-Sakip agar bisa mengukur kinerja yang ada di SKPD masing-masing. Dan juga DPMD pun berharap bisa membuat aplikasi atau teknologi informasi yang dapat mengukur kinerja yang ada di DPMD itu sendiri. Pengukuran kinerja saat ini dilakukan dengan monitoring secara berkala mulai dari kinerja pada level atas sampai dengan level individu.
- b. Untuk evaluasi kinerja internal DPMD masih belum menggunakan teknologi informasi. Namun kedepannya DPMD

akan berusaha menggunakan teknologi informasi dalam mengevaluasi kinerja internal DPMD.

Kepala,



Drs. RAHMADI

NIP. 19760302 199412 1 001